



# KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 3-4 Kuningan Jakarta Selatan  
Telp. (021) 52992777, 52992999 Faks. (021) 5204383  
website : [www.kemenkopukm.go.id](http://www.kemenkopukm.go.id) e-mail: [info@kemenkopukm.go.id](mailto:info@kemenkopukm.go.id)

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 285/SK-Dep.3/VIII/2021

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ari Anindya Hartika, S.TP**  
NIP : 19690328 199803 1 001  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Usaha Kecil dan Menengah  
Alamat : Jln. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4 Kuningan Jakarta Selatan

Menerangkan bahwa :

Nama : **Dr. Nur Wening, S.E., M.Si**  
Jabatan : Ahli Manajemen (**Ketua Tim**)  
Perusahaan : PT. Citra Bintang Mataram  
Alamat : Jalan Kadisoka Banjeng RT.004/ RW035 Maguwoharjo, Depok, Sleman Yogyakarta  
Masa Berlaku Kontrak : 10 Juni 2021 s/d 07 September 2021

Bahwa nama di atas telah melaksanakan pekerjaan **Studi Pemilihan Lokasi dan Kelayakan Rumah Produksi Bersama (Factory Sharing)** di Provinsi Jawa Tengah dengan hasil yang baik dan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 September 2021

Asisten Deputy Pengembangan  
Kawasan dan Rantai Pasok



Ari Anindya Hartika  
NIP. 19690328 199803 1 001



**ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN UKM DAN RANTAI PASOK  
DEPUTI BIDANG USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
Jl. HR Rasuna Said Kav 3-4 Karet Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan DKI  
Jakarta, 12940



## **LAPORAN PROGRES**

**STUDI PEMILIHAN LOKASI DAN KELAYAKAN RUMAH PRODUKSI  
BERSAMA (FACTORY SHARING) DI PROVINSI JAWA TENGAH**

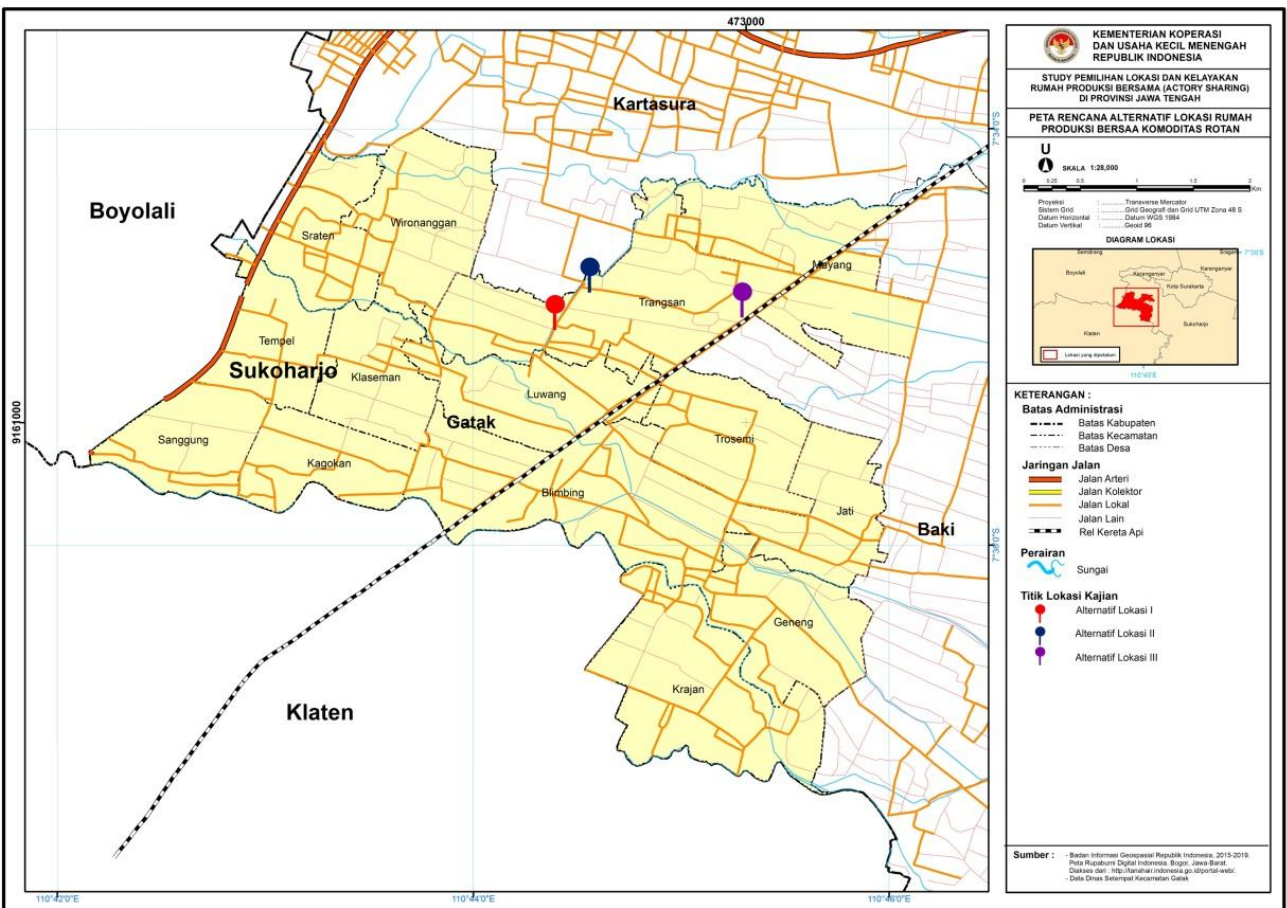
**TAHUN ANGGARAN 2021**



# KEGIATAN SURVEY LOKASI

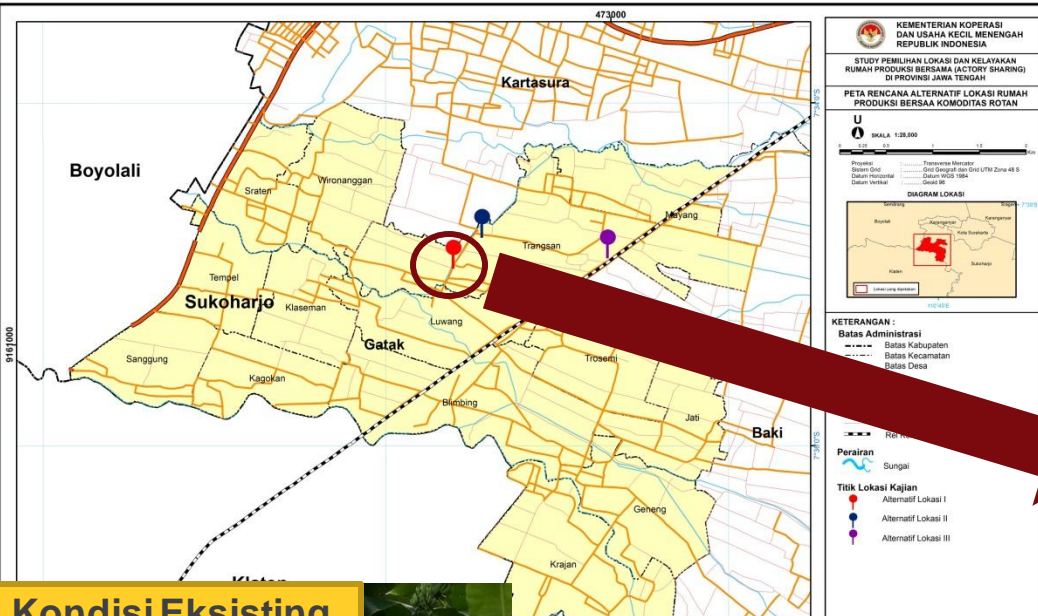


# ALTERNATIF LOKASI RENCANA RUMAH PRODUKSI KOMODITAS ROTAN





# ALTERNATIF LOKASI 1



KEMENTERIAN KOPERASI  
DAN USAHA KECIL, MENENGAH  
REPUBLIC INDONESIA

STUDI PEMILIHAN LOKASI DAN KELAYAKAN  
RUMAH PRODUKSI BERSAIA (FACTORY SHARING)  
DI PROVINSI JAWA TENGAH

PETA RENCANA ALTERNATIF LOKASI RUMAH  
PRODUKSI BERSAIA KOMODITAS ROTAN

U  
SKALA 1:25.000

Profil: ———— Titik-titik Mantri  
Batas Grid ———— Garis Sempadan dan Garis UTM Zona 48 S  
Batas Hidrologis ———— Garis RUCI 500  
Dataran Vertikal ———— Jarak 50

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN:  
Batas Administrasi  
Batas Kabupaten  
Batas Kecamatan  
Batas Desa

Perairan  
Sungai

Titik Lokasi Kajian  
● Alternatif Lokasi I  
● Alternatif Lokasi II  
● Alternatif Lokasi III

Referensi:  
1. Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia, 2015-2019  
Peta Keperluan Digital Indonesia: Bogor, Jawa Barat  
Diakses dari: <http://webduniasiblog.com/2019/05/01/>  
2. Data Datas Berbasis Geospasial Kabupaten Gatak



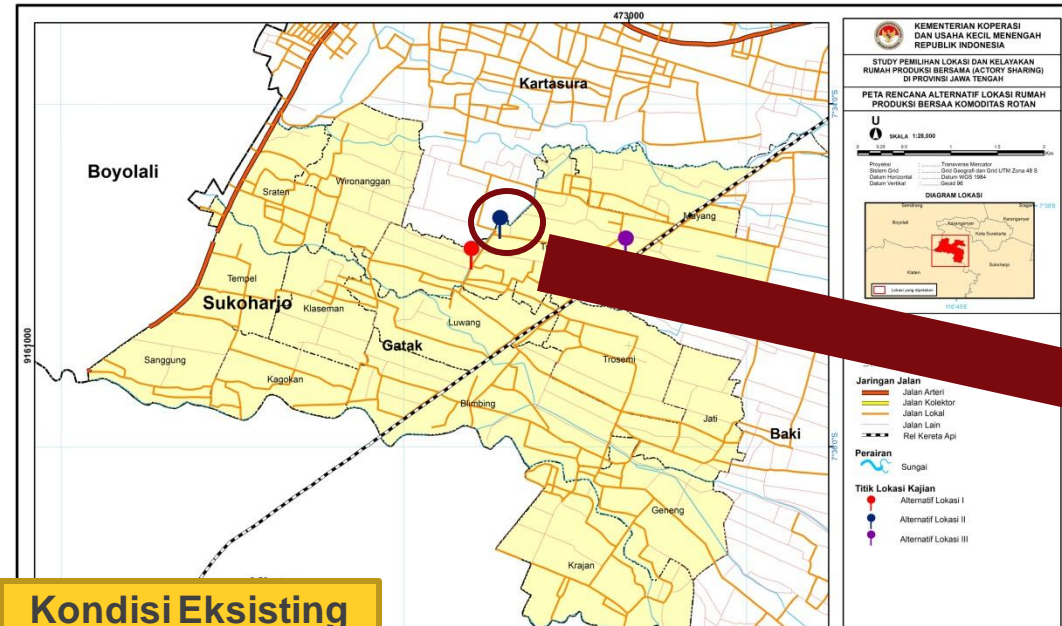
Kondisi Eksisting



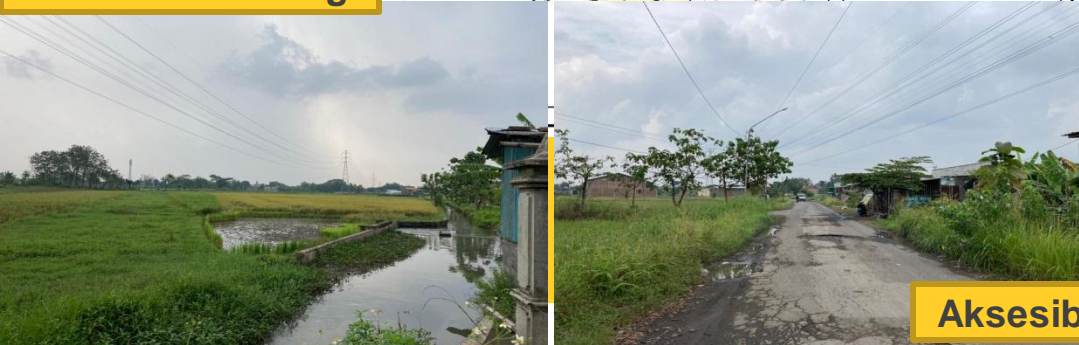
Aksesibilitas

- Luas ± 3.000 m<sup>2</sup>
  - Belakang Balai Desa Trangsan
  - Penggunaan Lahan saat ini berupa kolam-kolam dan ada beberapa tanaman
- Status Kepemilikan : Tanah Kas Desa

# ALTERNATIF LOKASI 2



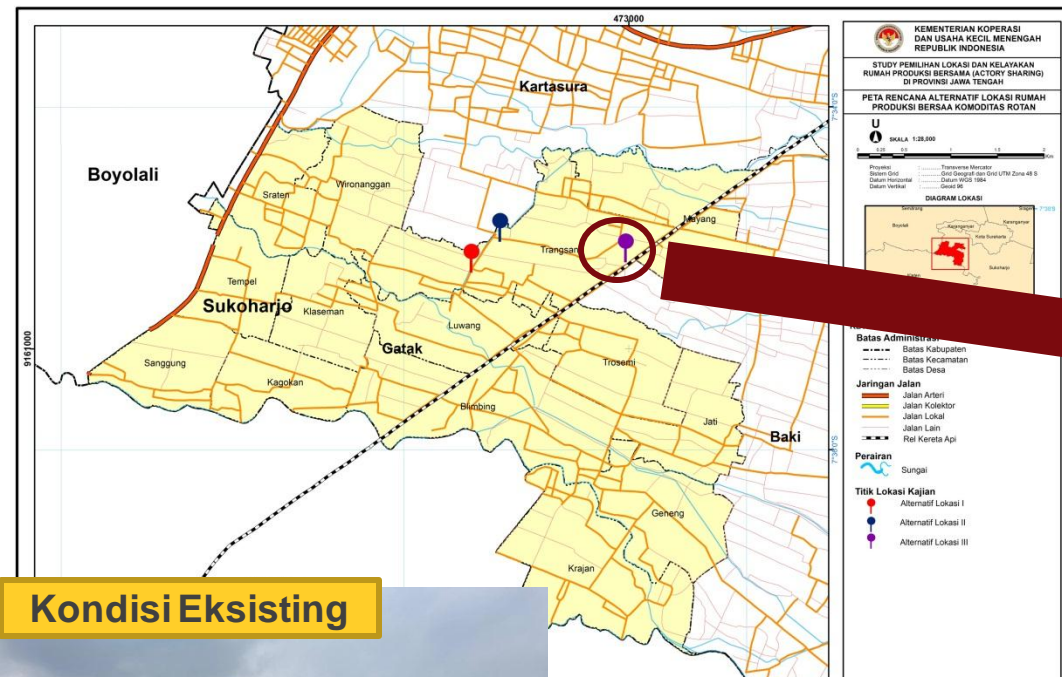
- Luas ± 8.000 m<sup>2</sup>
- Penggunaan lahan saat ini berupa pertanian
- Status kepemilikan: Tanah Kas Desa



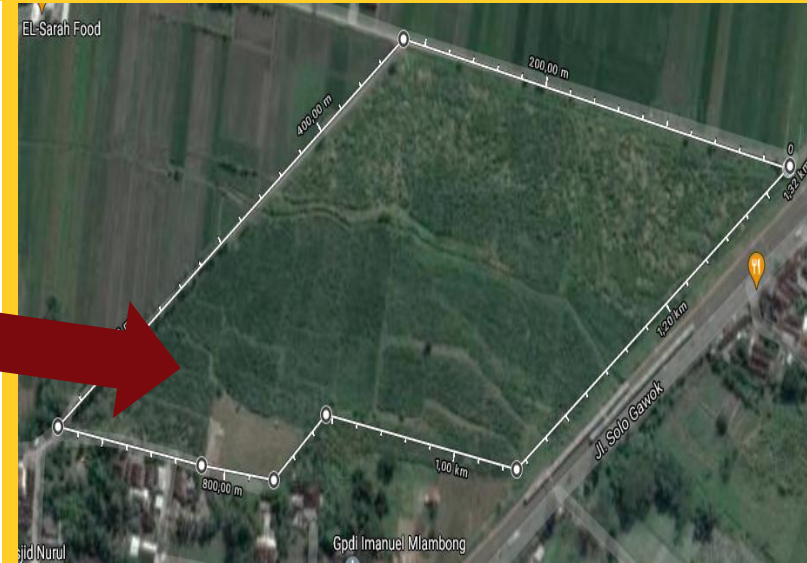
Aksesibilitas



# ALTERNATIF LOKASI 3



Kondisi Eksisting



- Luas ± 7 Ha
- Dekat dengan rel kereta api
- Penggunaan lahan saat ini berupa pertanian tanaman tebu
- Status kepemilikan: tanah kas desa



Aksesibilitas



# DAERAH ASAL ROTAN

Rotan yang berasal dari  
Sulawesi



Rotan yang berasal dari  
Kalimantan



KALIMANTAN

SULAWESI

SUMATERA

# KOPERASI SERBA USAHA (SEBAGAI PENYIMPAN BAHAN BAKU ROTAN)



STRUKTUR ORGANISASI

# PROSES DISTRIBUSI KE UKM ROTAN





# HARGA ROTAN SETENGAH JADI

1 kg = Rp19.000,00 dan  
Rp17.000,00 (Dijual per ikat)



Dimanfaatkan untuk  
membuat kerangka

Dimanfaatkan untuk  
mengikat kerangka

1 kg = Rp35.000,00

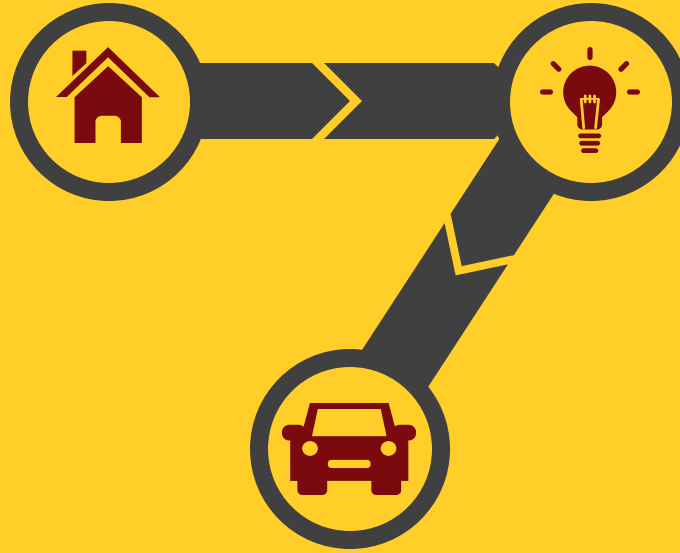


1 m<sup>2</sup> = Rp125.000,00  
10

# PROSES PENGOLAHAN ROTAN

## KOPERASI

Koperasi sebagai penyedia bahan baku rotan setengah jadi. Para pelaku UKM memilih bahan baku rotan sesuai dengan permintaan produk yang akan diproduksi.



## RUMAH ATAU PABRIK KECIL

Pemotongan rotan → *steam* → perakitan kerangka kerajinan rotan furnitur → proses anyaman



## TEMPAT FINISHING



Finishing



Pengemasan



Siap diekspor





**LIMBAH ROTAN**

**TEMPAT PEMBAKARAN**

## **PEMANFAATAN LIMBAH ROTAN**

Limbah rotan dimanfaatkan dengan menggunakannya sebagai bahan bakar untuk proses pembakaran pada pembuatan kerajinan furnitur rotan



# UPAYA YANG DILAKUKAN



## Koperasi

Pelatihan pembuatan kerajinan rotan furnitur



## Dinas

Pelatihan manajemen pemasaran *online*, ekspor



# PROSES PEMASARAN



# URGENSI PERLUNYA *FACTORY SHARING*



## Harga Bahan Baku

Harga penjualan bahan baku berbeda-beda setiap penjual, sehingga perlu adanya terminal bahan baku agar harga dan kualitas rotan dapat terkontrol.



## Kualitas Bahan Baku

Terkadang bahan yang datang ke Desa Trangsan kurang sesuai dengan permintaan



## Peran Pemerintah

Belum ada bantuan pemerintah, hanya memfasilitasi pelatihan. Perlu adanya Kerjasama dengan pemerintah dalam aspek pengadaan bahan baku rotan

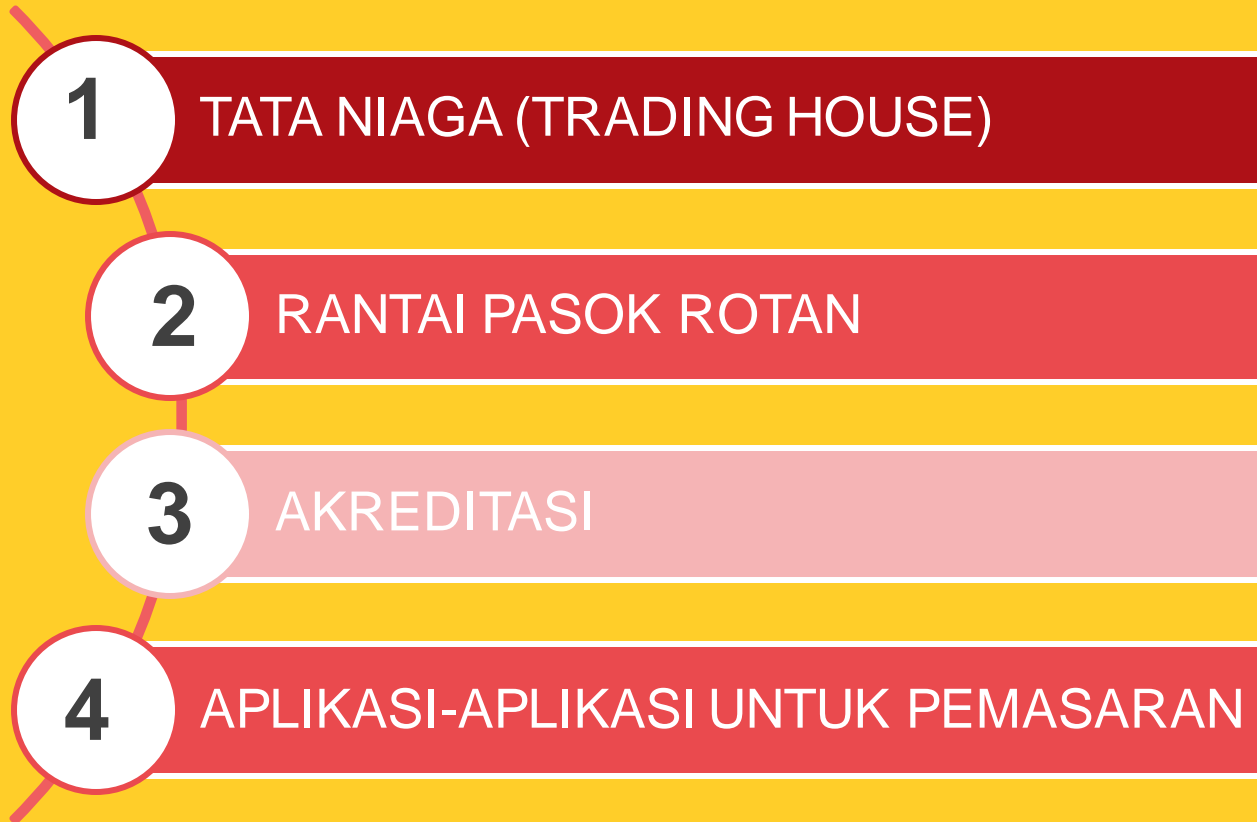


## Desain Kerajinan

Perlu adanya rumah desain (Kerjasama dengan pemerintah dan perguruan tinggi)



# RUANG LINGKUP KAJIAN FACTORY SHARING





DESA WISATA ROTAN TRANGSAM

**TERIMA KASIH**



**ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN UKM DAN RANTAI PASOK**  
**DEPUTI BIDANG USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
Jalan H. R. Rasuna Said No.Kav. 3-4, RT.6/RW.7, Kuningan, Karet Kuningan,  
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta

# LAPORAN AKHIR

**STUDI PEMILIHAN LOKASI DAN KELAYAKAN**  
**RUMAH PRODUKSI BERSAMA (*FACTORY SHARING*)**  
**DI PROVINSI JAWA TENGAH**

AREA ANYAM



**TAHUN ANGGARAN 2021**



## KATA PENGANTAR

Terkait dengan kewajiban dalam kegiatan Studi Pemilihan Lokasi dan Kelayakan Rumah Produksi Bersama (*Factory Sharing*) di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021, maka bersama ini kami sebagai Pelaksana Pekerjaan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyiapkan dan membuat suatu produk Laporan Akhir.

Sistematika Laporan Akhir yang kami susun tersebut akan berisikan tentang Pendahuluan, Tinjauan Kebijakan, Gambaran Umum Wilayah, Analisis Studi Pemilihan Lokasi dan Kelayakan serta Kesimpulan dan Rekomendasi.

Berkenaan dengan hal tersebut, Tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya penyusunan Laporan Akhir ini. Semoga kajian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan tema kajian terkait.

Jakarta, 2021

TIM PENYUSUN

# LAPORAN AKHIR

## STUDI PEMILIHAN LOKASI DAN KELAYAKAN RUMAH PRODUKSI BERSAMA (FACTORY SHARING) DI PROVINSI JAWA TENGAH

### DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran .....	I-2
1.3. Ruang lingkup .....	I-3
1.3.1. Ruang Lingkup Kegiatan Studi Kelayakan .....	I-3
1.3.2. Lingkup Wilayah .....	I-4
1.4. Waktu Pelaksanaan .....	I-7
1.5. Sistematika Laporan .....	I-8
<b>BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN</b>	
2.1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian .....	II-1
2.1.1. Pembangunan Sumber Daya Industri .....	II-1
2.1.2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri .....	II-2
2.1.3. Pemberdayaan Industri .....	II-3
2.2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional .....	II-4
2.3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/11/2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan .....	II-8
2.4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/4/2016 tentang Perdagangan Antarpulau Rotan .....	II-9
2.5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037.	II-11
<b>BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH</b>	
3.1. Kondisi Geografis dan Administrasi.....	III-1
3.2. Kondisi Fisik .....	III-6
3.2.1. Geologi dan Struktur Tanah .....	III-6
3.2.2. Klimatologi .....	III-14
3.2.3. Penggunaan Lahan .....	III-16
3.2.4. Kebencanaan .....	III-19
3.3. Kondisi Kependudukan .....	III-15
3.3.1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk .....	III-24

# LAPORAN AKHIR

## STUDI PEMILIHAN LOKASI DAN KELAYAKAN RUMAH PRODUKSI BERSAMA (FACTORY SHARING) DI PROVINSI JAWA TENGAH

3.3.2.	Pertumbuhan Penduduk .....	III-26
3.3.3.	Struktur Penduduk .....	III-28
3.4.	Kondisi Sosial Budaya .....	III-29
3.4.1.	Pendidikan .....	III-29
3.4.2.	Kesehatan .....	III-30
3.4.3.	Agama .....	III-32
3.4.4.	Kemiskinan .....	III-35
3.5.	Kondisi Perekonomian .....	III-36
3.5.1.	Industri Mikro dan Kecil .....	III-36
3.5.2.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	III-36
3.6.	Potensi Daerah .....	III-37
3.6.1.	Infrastruktur Wilayah .....	III-37
3.6.2.	Kehutanan .....	III-38
3.6.3.	Pariwisata .....	III-40
3.7.	Justifikasi Pemilihan Lokasi .....	III-42

### BAB IV ANALISIS STUDI PEMILIHAN LOKASI DAN KELAYAKAN

4.1.	Aspek Umum dan Legalitas (Hukum dan Kepatuhan) .....	IV-1
4.1.1.	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009- 2029 .....	IV-1
4.1.2.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011- 2031 .....	IV-3
4.1.3.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026 .....	IV-4
4.1.4.	Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo .....	IV-6
4.1.5.	Rencana Pengembangan Industri Kabupaten Sukoharjo .....	IV-8
4.2.	Aspek Sosial dan Budaya .....	IV-11
4.3.	Aspek Teknik Perencanaan .....	IV-18
4.3.1.	Penentuan Strategi Produksi dan Perencanaan Produk .....	IV-18
4.3.2.	Proses Pemilihan Teknologi untuk Produksi .....	IV-19
4.3.3.	Penentuan Kapasitas Produksi .....	IV-33
4.3.4.	Lokasi Usaha dan Layout .....	IV-34
4.3.5.	Rencana Pengendalian Persediaan Bahan Baku dan Bahan Jadi... ..	IV-56
4.3.6.	Pengawasan Kualitas Produk .....	IV-64
4.4.	Aspek Pemasaran .....	IV-66
4.5.	Aspek Sumber Daya Manusia .....	IV-72
4.6.	Aspek Manajemen Resiko .....	IV-74



# LAPORAN AKHIR

## STUDI PEMILIHAN LOKASI DAN KELAYAKAN RUMAH PRODUKSI BERSAMA (FACTORY SHARING) DI PROVINSI JAWA TENGAH

4.7.	Aspek Lingkungan .....	IV-75
4.8.	Aspek Sumber Daya Alam .....	IV-77
4.9.	Aspek Finansial .....	IV-79
4.9.1.	Asumsi .....	IV-80
4.9.2.	Biaya Investasi .....	IV-82
4.9.3.	Biaya Operasional dan Pemeliharaan .....	IV-83
4.9.4.	Pendapatan .....	IV-84
4.9.5.	Analisis Kelayakan Finansial .....	IV-88
4.10	Aspek Kebijakan .....	IV-90

### BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1.	Kesimpulan .....	V-1
5.2.	Rekomendasi .....	V-2
5.2.1.	Penanaman Modal .....	V-2
5.2.2.	Tata Ruang .....	V-2
5.2.3.	Infrastruktur .....	V-3



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.

#### LATAR BELAKANG

Produk mebel rotan merupakan komoditas yang prospektif. Mebel rotan dibutuhkan manusia masa kini sebagai salah satu pilihan perabot dalam menunjang aktivitas hidup sehari-hari. Mebel dapat berupa kursi, meja, pembatas ruang, rak, dan aksesoris pendukungnya misalnya, tempat majalah, bingkai kaca cermin, kap lampu, dan lain sebagainya. Produk rotan dapat beradaptasi dengan dinamika desain modern tetapi masih tetap memperlihatkan kesan alami sehingga dapat ditempatkan sesuai dengan tema dan gaya interior yang diinginkan.

Sebagai bahan alami, rotan mempunyai keunggulan fisik dan artistik yang unik, sehingga mebel rotan disukai banyak konsumen baik dalam maupun luar negeri. Regulasi pelarangan ekspor rotan mentah tahun 2012 lalu, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan yaitu No. 35/MDAG/PER/11/2011 tentang Kebijakan Ekspor Rotan dan Produk Rotan. Penjualan rotan mentah secara langsung hanya menciptakan lapangan kerja sempit yaitu sebatas aktivitas produktif para pemanen dan pedagangnya. Bila rotan diolah sampai menjadi produk jadi, maka sumber daya alam ini dapat menjadi sarana terciptanya lapangan kerja yang lebih luas sehingga dapat menyejahterakan masyarakat secara lebih luas juga. Nilai jual rotan pun ikut naik karena telah diolah menjadi berbagai produk yang mempunyai nilai jual lebih tinggi dibandingkan dengan menjual rotan asalan maupun rotan olahan setengah jadi.

Terdapat beberapa kota di Indonesia yang menjadi penghasil mebel rotan, diantaranya Cirebon, Jepara, dan Sukoharjo. Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah yang penduduknya banyak menjadi wirausahawan. Banyak masyarakat yang mengembangkan industri kerajinan kreatif seperti kerajinan ukir, monel, tenun, relief, rotan, dan lainlain. Melalui jiwa kreatif ini maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Tulus Tambunan, 2002: 4; Alamsyah, 2012: 2). Kerajinan Rotan sebagai salah satu bentuk kreativitas masyarakat yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah. Di sentra kerajinan rotan ini diproduksi berbagai produk kerajinan rotan dan furniture rotan.

Dalam menghadapi persaingan perdagangan internasional, industri kerajinan rotan harus memiliki daya saing yang tinggi salah satunya adanya rantai nilai (value chain) yang efektif. Rantai nilai yang efektif merupakan kunci keunggulan kompetitif (competitive advantage) yang dapat menghasilkan nilai tambah (value added) bagi suatu industri (Liana Mangifera, 2015: 24). Persaingan bisnis yang semakin ketat disebabkan oleh dampak globalisasi dan diberlakukannya perdagangan bebas sehingga menggeser paradigma bisnis dari comparative advantage menjadi competitive advantage. Hal ini membuat kegiatan bisnis atau perusahaan harus memilih strategi yang tepat, yaitu perusahaan berada dalam posisi strategis dan bisa beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Tuntutan peningkatan daya saing bisnis akan meningkatkan ketahanan sebuah industri kerajinan (Ratih Marina Kurniaty, dkk, 2012: 147).

Produk kerajinan rotan mengalami fluktuasi karena adanya kenaikan harga bahan baku dan perubahan permintaan konsumen dari produk yang berbahan rotan ke produk yang berbahan aluminium dan plastik. Inovasi pengusaha masih cukup lemah baik dari aspek pewarnaan produk dan model (Adijati Utamaningsih, 2016: 80). Desain dan inovasi produk minim dilakukan karena keterbatasan pengetahuan pengusaha. Mereka lebih cenderung menghasilkan produk sesuai pesanan dan bila ada pesanan dengan desain tertentu tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan kemampuan mendesain produk (A. Khoirul Anam dan Edi Susilo, 2018: 190). Berdasarkan hal tersebut diatas maka Kementerian Koperasi dan UKM cq. Deputi Bidang UKM akan melakukan Studi Pemilihan Lokasi dan Kelayakan Rumah Produksi Bersama (Factory Sharing) Koperasi/Ukm Furniture (Rotan) di Provinsi Jawa Tengah.

### 1.2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Maksud Kegiatan ini adalah Tersusunnya data dan informasi sebagai pedoman dalam pengembangan dan perencanaan Pemilihan Lokasi dan Kelayakan Rumah Produksi Bersama (Factory Sharing) Koperasi/UKM Furniture (Rotan) di Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan secara terstruktur, menyeluruh dan tuntas menyangkut seluruh aspek didalamnya diantaranya Sosial Ekonomi dan Budaya, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Perencanaan dan Desain, Operasional dan Pemeliharaan, Pembiayaan dan Investasi. Dari hasil Studi Kelayakan (Field Study) akan dirumuskan suatu rekomendasi sebagai salah satu alat dalam pengembangan dan perencanaan penetapan lokasi dan kelayakan Rumah Produksi Bersama (Factory Sharing) Koperasi/UKM Furniture (Rotan) di Provinsi Jawa Tengah.



Adapun tujuan kegiatan ini adalah:

- Menyusun hasil studi kelayakan pengembangan lokasi Rumah Produksi Bersama (Factory Sharing) Koperasi/UKM Furniture (Rotan) di Provinsi Jawa Tengah dengan memperhatikan Rencana Strategis Daerah dan Regulasi/Peraturan lainnya yang berlaku di Daerah;
- Membuat model bisnis dan skema pendanaan untuk pengembangan Rumah Produksi Bersama (Factory Sharing) Koperasi/UKM Furniture (Rotan) di Provinsi Jawa Tengah;
- Membuat rekomendasi kebijakan kelayakan pengembangan Rumah Produksi Bersama (Factory Sharing) Koperasi/UKM Furniture (Rotan) di Provinsi Jawa Tengah;

Adapun sasaran kegiatan ini adalah Koperasi/UKM Furniture (Rotan) di Provinsi Jawa Tengah.

### 1.3. RUANG LINGKUP

#### 1.3.1. RUANG LINGKUP KEGIATAN STUDI KELAYAKAN

Ruang Lingkup Studi Kelayakan meliputi berbagai aspek, sehingga dari berbagai aspek dapat dijadikan dasar untuk menentukan Apakah rencana pengembangan Rumah Produksi Bersama (Factory Sharing) Koperasi/UKM Furniture (Rotan) di Provinsi Jawa Tengah layak atau tidak untuk dilaksanakan. Disamping itu dapat diketahui faktor pembatas dan rekomendasi tindakan yang akan dilaksanakan. Berikut ini adalah aspek yang akan dikaji dalam Studi Kelayakan :

1. Aspek Umum dan Legalitas (hukum dan kepatuhan)
2. Aspek Sosial dan Budaya
3. Aspek Pemasaran
4. Aspek Teknik Perencanaan
5. Aspek Sumber Daya Manusia
6. Aspek Manajemen Resiko
7. Aspek Lingkungan
8. Aspek Sumber Daya Alam
9. Aspek Finansial

10. Aspek Bisnis

11. Aspek Investasi

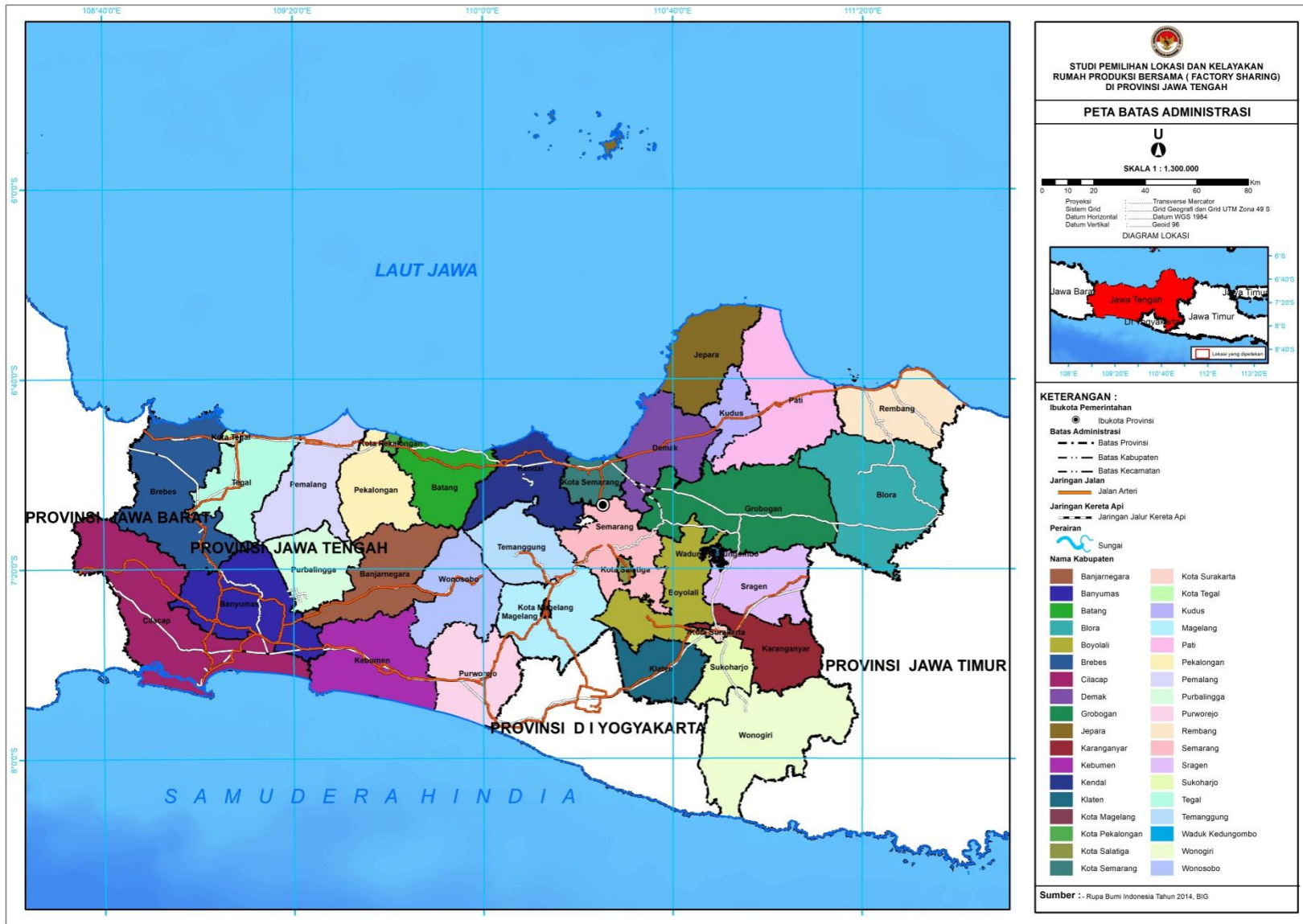
### 1.3.2. RUANG LINGKUP WILAYAH

Lokasi pekerjaan yang tercantum Studi Pemilihan Lokasi dan Kelayakan Rumah Produksi (Factory Sharing) di Provinsi Jawa Tengah mencakup Provinsi Jawa Tengah.

Provinsi Jawa Tengah terletak antara 5040' dan 8030' Lintang Selatan dan 108030' dan 111030' Bujur Timur serta memiliki luas 3,28 juta Ha atau sekitar 25,04% dari luas Pulau Jawa (1,70% dari luas Indonesia). Provinsi Jawa Tengah memiliki batas wilayah, diantaranya yaitu:

1. *Sebelah Utara* : *Laut Jawa*
2. *Sebelah Timur* : *Provinsi Jawa Timur*
3. *Sebelah Selatan* : *Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudera Hindia*
4. *Sebelah Barat* : *Provinsi Jawa Barat*

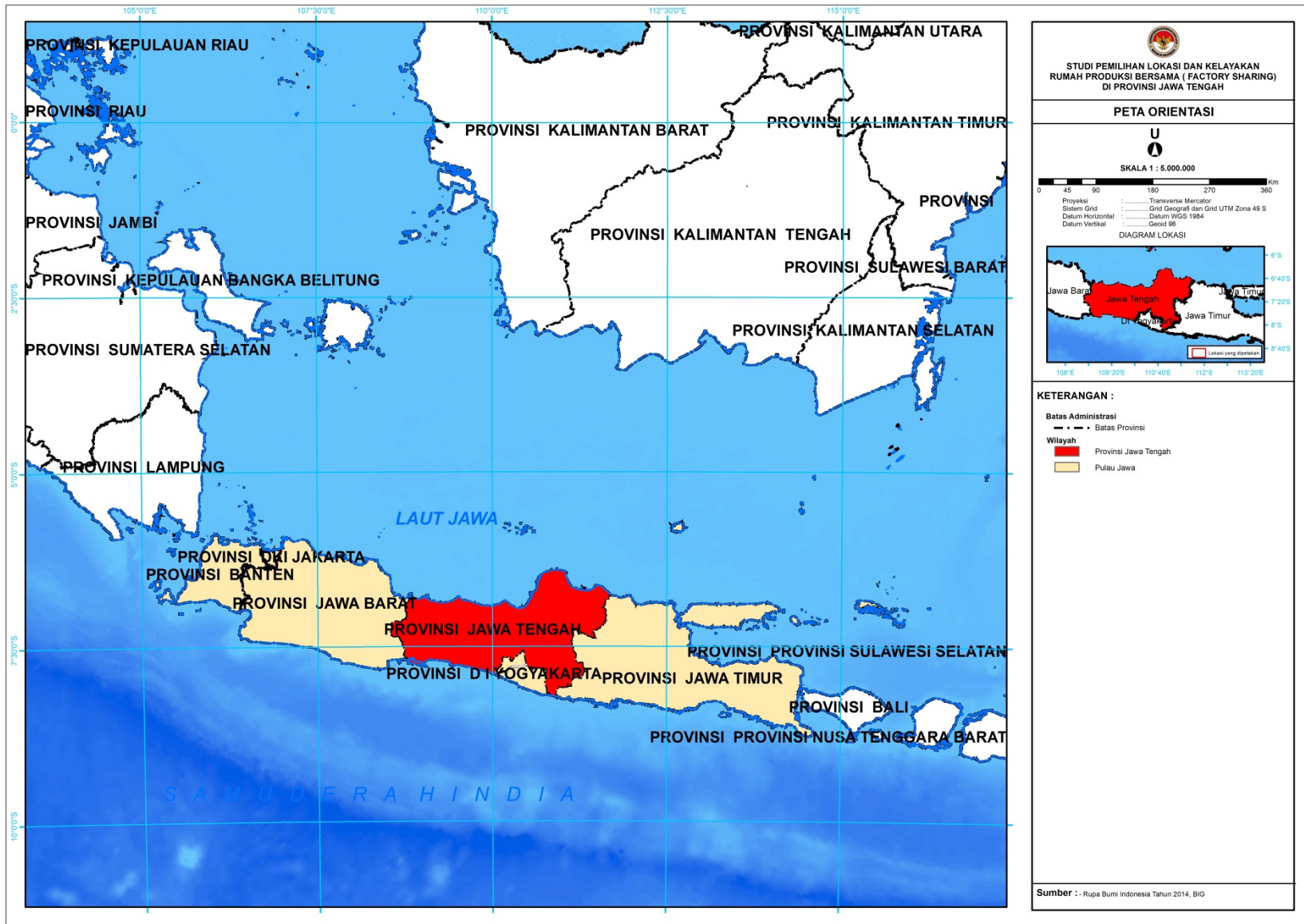
Secara lebih jelas, berikut ditunjukkan peta administrasi Provinsi Jawa Tengah.



Gambar I.1. Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Olah Data, 2021





Gambar I.2. Peta Orientasi Provinsi Jawa Tengah  
 Sumber: Olah Data, 2021

### 1.4. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan " Studi Pemilihan Lokasi dan Kelayakan Rumah Produksi Bersama (Factory Sharing) Koperasi/UKM Furniture (Rotan) di Provinsi Jawa Tengah" akan dilaksanakan dalam jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sebagai berikut :

No	Keterangan	Bulan		
		1	2	3
1	Mobilisasi tim konsultan			
2	Pembahasan laporan pendahuluan			
3	Rapat koordinasi dan dengan pemberi kerja (pusat)			
4	Pengumpulan data sekunder dan data pendukung lainnya (desk study)			
5	Survey lokasi kegiatan			
6	Koordinasi dengan SKPD/Dinas Kabupaten dan Provinsi Jawa tengah			
7	Observasi dan wawancara (pengumpulan data primer)			
8	Pembahasan laporan antara			
9	FGD			
10	Pembahasan Laporan akhir			
11	Penyusunan laporan akhir			



Gambar 1.3. Ilustrasi Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Konsultan dalam Pelaksanaan Pekerjaan

## 1.5. SISTEMATIKA LAPORAN

Dalam menunjang pelaporan kegiatan, sistematika penulisan Laporan Akhir Studi Pemilihan Lokasi dan Kelayakan Rumah Produksi Bersama (*Factory Sharing*) di Provinsi Jawa Tengah disusun dengan ketentuan sebagai berikut.

### BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, maksud, tujuan, dan sasaran kegiatan, ruang lingkup kegiatan, ruang lingkup kegiatan, dan sistematika laporan.

### BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN

Menguraikan tentang peraturan-peraturan yang menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan.

### BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH

Berisi tentang uraian gambaran umum wilayah Provinsi Jawa Tengah

### BAB IV ANALISIS STUDI PEMILIHAN LOKASI DAN KELAYAKAN

Berisi pembahasan terkait pemilihan lokasi dan kelayakan rumah produksi bersama (*factory sharing*).

### BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berisi kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan terkait pemilihan lokasi dan kelayakan rumah produksi bersama (*factory sharing*) dan rekomendasinya.





# BAB II

## TINJAUAN KEBIJAKAN

### 2.1. UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN

Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industry sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

#### 2.1.1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

Pembangunan sumber daya industri meliputi:

1. Pembangunan sumber daya manusia;

Sumber daya manusia industry meliputi:

a. Wirausaha industri;

b. Tenaga kerja industri;

Tenaga kerja industry terdiri atas:

1) Tenaga teknis; dan

2) Tenaga manajerial.

c. Pembina industri; dan

Pembina industri dapat bermitra dengan asosiasi industri dalam melakukan pembinaan dan pengembangan industri.

d. Konsultan industri.

Konsultan industri merupakan tenaga ahli yang berperan untuk membantu, memberi, saran, dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pelaku industri dan Pembina industri.

### 2. Pemanfaatan sumber daya alam;

Sumber daya alam diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam wajib dilakukan oleh:

- a. Perusahaan industri pada tahap perancangan produk, perancangan proses produksi, tahap produksi, optimalisasi sisa produk, dan pengelolaan limbah; dan
- b. Perusahaan Kawasan Industri pada tahap perancangan, pembangunan, dan pengelolaan Kawasan Industri, termasuk pengelolaan limbah.

### 3. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;

Pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang industri.

### 4. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dilakukan dengan memberdayakan budaya industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat.

### 5. Penyediaan sumber pembiayaan.

Pembiayaan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah hanya dapat diberikan kepada perusahaan Industri yang berbentuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Pembiayaan diberikan dalam bentuk:

- a. Pemberian pinjaman;
- b. Hibah; dan/atau
- c. Penyertaan modal

## 2.1.2. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI

Pembangunan sarana dan prasarana industri meliputi:

### 1. Standarisasi industri;

Setiap barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib, pelaku usaha atau pemilik barang dan/atau Jasa Industri wajib menarik barang dan/atau menghentikan kegiatan jasa industri.

### 2. Infrastruktur industri; dan

Infrastruktur industri paling sedikit meliputi:

- a. Lahan industry berupa kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industry;
  - b. Fasilitas jaringan energi dan kelistrikan;
  - c. Fasilitas jaringan telekomunikasi;
  - d. Fasilitas jaringan sumber daya air;
  - e. Fasilitas sanitasi; dan
  - f. Fasilitas jaringan transportasi.
3. Sistem Informasi Industri Nasional.

### 2.1.3. PEMBERDAYAAN INDUSTRI

Pemberian fasilitas industri kecil dan industri menengah diberikan dalam bentuk:

1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;
2. Bantuan dan bimbingan teknis;
3. Bantuan bahan baku dan bahan penolong;
4. Bantuan mesin atau peralatan;
5. Pengembangan produk;
6. Bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau;
7. Bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran;
8. Akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru;
9. Penyediaan kawasan industry untuk industry kecil dan industry menengah yang berpotensi mencemari lingkungan; dan/atau
10. Pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan antara industry kecil dengan industry menengah, industry kecil dengan industry besar, dan industry menengah dengan industry besar, serta industry kecil dan industry menengah dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan.



### 2.2.

### PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL

Perkembangan industri hingga tahun 2006 tercatat bahwa cabang-cabang industri yang memberikan sumbangan tinggi terhadap pembentukan PDB (Product Domestic Bruto) industri pengolahan non migas. Kinerja ekspor industri non-migas setelah krisis perkembangannya juga menunjukkan kecenderungan meningkat yang menunjukkan pentingnya industri non-migas dalam perekonomian. Walaupun kinerja ekspor terus meningkat namun ekspor non-migas masih sangat bergantung pada industri yang menggunakan sumber daya alam dan padat karya seperti tekstil dan produk tekstil, kayu dan barang dari kayu, sepatu. Di lain pihak, sudah mulai terlihat peningkatan ekspor beberapa produk industri berteknologi tinggi seperti besi baja, mesin dan kendaraan bermotor, elektronika, serta kimia dasar.

Meskipun industri sudah menunjukkan berbagai keberhasilan, namun terdapat sejumlah permasalahan mendasar yang harus segera diselesaikan, yaitu:

1. Makro: antara lain lemahnya prasarana dan sarana; ekonomi biaya tinggi; kesenjangan pembangunan daerah; masih lemahnya penguasaan teknologi.
2. Meso: belum kuatnya peran Industri Kecil dan Menengah (IKM); penurunan kinerja di beberapa cabang industri terutama cabang industri kayu dan produk kayu, serta tekstil dan produk tekstil; dan keterbatasan industri berteknologi tinggi.
3. Industri: masih terbatasnya pasokan bahan baku dan energi; tingginya impor bahan baku dan penolong, walaupun sejak krisis telah mencapai banyak kemajuan dalam penggunaan bahan baku dan penolong lokal; keterbatasan produksi barang setengah jadi dan komponen; terbatasnya penerapan standardisasi; masih belum optimalnya kapasitas produksi; masih terbatasnya penguasaan pasar domestik; ketergantungan ekspor hanya pada beberapa komoditi dan beberapa negara tujuan; tingginya penyelundupan; terbatasnya pengembangan merek lokal.

Klaster industri adalah sekelompok industri inti yang terkonsentrasi secara regional maupun global yang saling berhubungan atau berinteraksi sosial secara dinamis, baik dengan industri terkait, industri pendukung maupun jasa penunjang, infrastruktur ekonomi dan lembaga terkait dalam meningkatkan efisiensi, menciptakan aset secara kolektif dan mendorong terciptanya inovasi sehingga tercipta keunggulan kompetitif.

Industri Inti adalah industri yang menjadi basis dalam pengembangan klaster industri nasional. Industri Penunjang adalah industri yang berperan sebagai

pendukung serta penunjang dalam pengembangan industri inti secara integratif dan komprehensif.

Industri Prioritas adalah klaster industri yang memiliki prospek tinggi untuk dikembangkan berdasarkan kemampuannya bersaing di pasar internasional, dan industri yang faktor-faktor produksi untuk bersaingnya tersedia dengan cukup di Indonesia.

Dalam jangka panjang pembangunan industri diarahkan pada penguatan, pendalaman dan penumbuhan klaster kelompok industri prioritas sebagai berikut:

1. Basis industry manufaktur yang terdiri atas kelompok-kelompok industri:
  - a. Industri Material Dasar; yang terdiri dari:
    - 1) Industri Besi dan Baja;
    - 2) Industri Semen;
    - 3) Industri Petrokimia;
    - 4) Industri Keramik.
  - b. Industri Permesinan; yang meliputi:
    - 1) Industri Peralatan Listrik dan Mesin Listrik;
    - 2) Industri Mesin dan Peralatan Umum.
  - c. Industri Manufaktur Padat Tenaga Kerja; merupakan penghasil produk sandang, pangan, bahan bangunan, kesehatan dan obat, dan sebagainya, yang meliputi antara lain:
    - 1) Industri Tekstil dan Produk Tekstil;
    - 2) Industri Alas Kaki;
    - 3) Industri Farmasi dengan Bahan Baku dalam Negeri.
2. Kelompok industry agro yang meliputi cabang-cabang industry pengolahan:
  - a. Industri Kelapa Sawit;
  - b. Industri Karet dan Barang Karet;
  - c. Industri Kakao dan Coklat;
  - d. Industri Kelapa;
  - e. Industri Kopi;
  - f. Industri Gula;

- g. Industri Tembakau;
  - h. Industri Buah-buahan;
  - i. Industri Kayu dan Barang Kayu;
  - j. Industri Hasil Perikanan dan Laut;
  - k. Industri Pulp dan Kertas;
  - l. Industri Pengolahan Susu.
3. Kelompok Industri Alat Angkut; yang meliputi:
    - a. Industri Kendaraan Bermotor;
    - b. Industri Perkapalan;
    - c. Industri Kedirgantaraan;
    - d. Industri Perkeretaapian.
  4. Kelompok Industri Elektronika dan Telematika; meliputi:
    - a. Industri Elektronika, Industri Perangkat Keras Telekomunikasi dan Pendukungnya;
    - b. Industri Perangkat Penyiaran dan Pendukungnya;
    - c. Industri Komputer dan Peralatannya;
    - d. Industri Perangkat Lunak dan Content Multimedia;
    - e. Industri Kreatif Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
  5. Kelompok Industri Penunjang Industri Kreatif dan Industri Kreatif Tertentu yang meliputi:

Industri perangkat lunak dan *content* multimedia, *fashion*, dan kerajinan dan barang seni.
  6. Industri Kecil dan Menengah Tertentu yang meliputi:

Industri-industri pengolahan: Industri Batu Mulia dan Perhiasan, Industri Garam Rakyat, Industri Gerabah dan Keramik Hias, Industri Minyak Atsiri dan Industri Makanan Ringan.



Penguatan, pendalaman dan penumbuhan 6 klaster industri prioritas salah satunya adalah industri berbasis agro yaitu kayu dan barang kayu (termasuk rotan dan bambu):

### 1. Jangka Menengah

- a. Meningkatkan Kerjasama antar pemerintah daerah, produsen kayu/rotan dengan produsen mebel kayu dan rotan dalam rangka penyediaan bahan baku kayu
- b. Memfasilitasi pembangunan terminal kayu/rotan di beberapa daerah sintra produksi mebel
- c. Meningkatkan mutu dan desain mebel kayu dan mebel rotan
- d. Mempercepat tumbuhnya industry pengolahan kayu di daerah sumber bahan baku
- e. Mempercepat penggunaan teknologi modern yang mengadopsi keunggulan dan keunikan lokal
- f. Mengembangkan pusat desain industry mebel kayu dan mebel rotan
- g. Mempercepat penggunaan bahan bakualternatif (kayu kelapa, kayu kelapa sawit, kayu nangka, kayu durian, kayu mangga, dan lain-lain)
- h. Membangun dan revitalisasi UPT industry kayu dan rotan
- i. Mengembangkan kawasan industri khusus berbasis kayu dan rotan

### 2. Jangka Panjang

- a. Mempercepat pembangunan hutan tanaman (hutan tanaman industry (HTI) dan hutan tanaman rakyat)
- b. Melakukan optimalisasi dan intensifikasi fungsi Pusat Desain Mebel Kayu dan Mebel Rotan
- c. Mempercepat perkembangan industry permesinan nasional untuk mendukung kebutuhan mesin dan peralatan produksi industri pengolahan kayu dan rotan
- d. Meningkatkan kompetensi SDM kayu dan rotan
- e. Mengembangkan kawasan industri berbasis kayu dan rotan

2.3.

## PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 35/M-DAG//PER/11/2011 TENTANG KETENTUAN EKSPOR ROTAN DAN PRODUK ROTAN

### A. Definisi Rotan

Rotan mentah adalah rotan dalam bentuk mentah masih alami, tidak dirunti, tidak dicuci, tidak diasap/dibelerang. Rotan asalan adalah rotan yang sudah mengalami peruntian, pembersihan sisa selundang, pemotongan pembagian batang, belum mengalami penjemuran. Rotan washed and sulphurized yang selanjutnya disebut Rotan W/S adalah rotan yang berasal dari rotan asalan yang telah mengalami proses pengasapan belerang, penggorengan, penggosokan dan penjemuran tetapi masih berbentuk natural dan masih berkulit. Rotan setengah jadi adalah rotan yang telah diolah lebih lanjut menjadi rotan poles halus, hati rotan dan kulit rotan.

### B. Jenis Rotan Ex HS. 1401.20

Rotan yang termasuk dalam kelompok Ex HS. 1401.20 meliputi:

- a. Rotan mentah
- b. Rotan asalan
- c. Rotan W/S, dan
- d. Rotan setengah jadi

Dilarang untuk diekspor

### C. Jenis rotan yang dapat di ekspor

Produk rotan yang termasuk dalam kelompok Ex HS.4601, Ex HS. 4602, Ex HS. 9401 dan Ex HS.9403 hanya dapat diekspor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai ETPIK.

### D. Ketentuan ekspor produk rotan

- a. Ekspor produk rotan wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis sebelum muat barang.
- b. Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis ekspor produk rotan dilakukan oleh surveyor independen.
- c. Hasil verifikasi atau penelusuran teknis ekspor produk rotan ditangkan dalam bentuk:

- Laporan Surveyor (LS) dalam hal rotan yang diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau
  - Laporan hasil pemeriksaan (LHP) dalam hal rotan yang diperiksa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Laporan surveyor (LS) digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor kepada kantor pabean.
- e. Biaya yang timbul atas kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis ekspor dibebankan kepada pemerintah
- f. Laporan hasil verifikasi atau penelusuran teknis wajib disampaikan oleh surveyor paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada:
- Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian; dan
  - Direktur Jenderal Bina Usaha Kehtanan, Kementerian Kehutanan
- g. Surveyor yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi berupa pencabutan atas penetapan sebagai surveyor.

### 2.4.

## PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 27/M-DAG/PER/4/2016 TENTANG PERDAGANGAN ANTARPULAU ROTAN

### A. Definisi

Perdagangan Antarpulau Rotan adalah kegiatan perdagangan dan/atau pendistribusian rotan yang menggunakan angkutan air seperti kapal laut, angkutan sungai, angkutan penyebrangan/ferry, dan angkutan truk atau yang sejenisnya yang diseberangkan dengan menggunakan angkutan air. Pelaku usaha rotan yang selanjutnya disebut pelaku usaha adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan antarpulau rotan. Pernyataan mandiri atau self declaration adalah suatu bentuk pernyataan dari pelaku usaha yang melakukan perdagangan antarpulau rotan yang didukung dengan data yang akurat.

### B. Perdagangan AntarPulau Rotan

- a. Perdagangan AntarPulau Rotan meliputi perdagangan dan/atau pendistribusian rotan: antarpulau antarprovinsi, antarpulau dalam satu provinsi, dan antarpelabuhan dalam satu pulau.



- b. Rotan yang dimaksud berupa rotan mentah, rotan asalan, rotan W/S dan Rotan Setengah Jadi.
- c. Pelaku usaha untuk melaksanakan setiap perdagangan antarpulau rotan wajib menyampaikan pernyataan mandiri (self declaration) kepada kepala kantor administrator pelabuhan, otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan dan direktur jenderal perdagangan dalam negeri, kementerian perdagangan.
- d. Pernyataan mandiri yang harus disampaikan paling sedikit memuat:
  - Identitas pelaku usaha pengirim
  - Identitas pelaku usaha penerima
  - Jenis dan jumlah rotan
  - Wilayah asal dan tujuan pengiriman; dan
  - Moda angkutan

### C. Audit Perdagangan Antarpulau Rotan

- a. Menteri melakukan audit terhadap pelaksanaan perdagangan Antarpulau Rotan
- b. Audit dilakukan terhadap pernyataan mandiri yang disampaikan oleh pelaku usaha
- c. Audit dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu.
- d. Pelaksanaan audit, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dapat membentuk tim audit
- e. Tim audit terdiri dari perwakilan:
  - Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan
  - Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan
  - Direktorat Jenderal Perdagangan Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan
  - Direktorat Jenderal Industri Argo, Kementerian Perindustrian
  - Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produk Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
- Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan
- Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Republik Indonesia
- Asosiasi Dunia Usaha

f. Pelaksanaan audit dituangkan dalam bentuk laporan hasil audit

#### D. Sanksi Pelanggaran

- a. Pelaku usaha yang melanggar atau jika dalam laporan hasil audit terdapat bukti pernyataan mandiri tidak benar, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
  - Pencabutan perizinan di bidang perdagangan; atau
  - Pencabutan perizinan jenis lainnya oleh pejabat berwenang
- b. Pencabutan perizinan di bidang perdagangan, dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing tujuh hari kalender.
- c. Dalam hal pelaku usaha dikenakan sanksi administratif, menteri menyampaikan rekomendasi kepada pencabutan perizinan teknis kepada instansi terkait/ pejabat berwenang
- d. Menteri mendelegasikan kepada direktur jenderal perdagangan dalam negeri untuk menyampaikan rekomendasi.

#### 2.5.

#### PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017-2037

Industri unggulan Provinsi berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia terdiri dari:

1. Industri pertambangan dan penggalian lainnya;
2. Industri makanan;
3. Industri minuman;
4. Industri pengolahan tembakau;
5. Industri tekstil;
6. Industri pakaian jadi;

7. Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki;
8. Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furniture) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya;
9. Industri produk batu bara dan pengilangan minyak bumi;
10. Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia;
11. Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;
12. Industri logam dasar;
13. Industri komputer, barang elektronika dan optik;
14. Industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer;
15. Industri alat angkutan lainnya;
16. Industri furnitur;
17. Industri pengolahan lainnya; dan
18. Industri piranti lunak dan konten multimedia.

Industri Unggulan Provinsi berdasarkan wilayah meliputi :

- a. regional Kedungsapur, meliputi pengembangan Industri di wilayah Kota Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga dan Purwodadi;
- b. regional Wanarakuti, meliputi pengembangan Industri di wilayah Juwana, Jepara, Kudus dan Pati;
- c. regional Subosukowonosraten, meliputi pengembangan Industri di wilayah Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten;
- d. regional Bergasmalang, meliputi pengembangan Industri di wilayah Brebes, Tegal, Slawi dan Pemalang;
- e. regional Petanglong, meliputi pengembangan Industri di wilayah Kota Pekalongan, Batang dan Kabupaten Pekalongan;
- f. regional Barlingmascakeb, meliputi pengembangan Industri di wilayah Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen;
- g. regional Purwomanggung, meliputi pengembangan Industri di wilayah Purworejo, Wonosobo, Temanggung, Kota Magelang dan Kabupaten Magelang; dan
- h. regional Banglor, meliputi pengembangan Industri di wilayah Rembang dan Blora.



Identifikasi Potensi Daerah ini disusun berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015, salah satunya industri prioritas industri kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bamboo, rotan dan sejenisnya.

Tabel 2.1. Jenis Industri di Provinsi Jawa Tengah

No (1)	Jenis Industri (2)	Lokasi (3)
1	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus	Kota Semarang, Kab. Jepara, Kota Salatiga, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Boyolali, Kota Surakarta, Kab. Karanganyar, kab. Pati, Kab. Wonogiri, Kab. Semarang, Kab. Tegal, Kab. Blora, Kab. Batang, Kab. Magelang, Kab. Sragen
2	Pengolahan Kayu	Batang, Demak, Purbalingga, Temanggung, Wonosobo
3	Industri Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan Dan Sejenisnya	Kab Banjarnegara, Kab Batang, Kab Blora, Kab Brebes, Kab Cilacap, Kab Jepara, Kab Pekalongan, Kab Sukoharjo, Kab Tegal, Kab Magelang, Kab Kebumen, Kab Klaten, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kab Pemalang, Kab Purbalingga, Kota Semarang, Kab Sragen, Kab Wonogiri dan Kab Wonosobo



# BAB III

## GAMBARAN UMUM WILAYAH

### 3.1. KONDISI GEOGRAFIS DAN ADMINISTASI

Provinsi Jawa Tengah terletak antara 5<sup>o</sup>40' dan 8<sup>o</sup>30' Lintang Selatan dan 108<sup>o</sup>30' dan 111<sup>o</sup>30' Bujur Timur serta memiliki luas 3,28 juta Ha atau sekitar 25,04% dari luas Pulau Jawa (1,70% dari luas Indonesia). Provinsi Jawa Tengah memiliki batas wilayah, diantaranya yaitu:

5. Sebelah Utara : Laut Jawa
6. Sebelah Timur : Provinsi Jawa Timur
7. Sebelah Selatan : Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudera Hindia
8. Sebelah Barat : Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Kabupaten yang paling luas wilayahnya adalah Kabupaten Cilacap, diikuti Kabupaten Grobogan, sedangkan kota yang terkecil wilayahnya adalah Kota Magelang.

Tabel 4.1. Luas Kabupaten/Kota dan Persentase di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

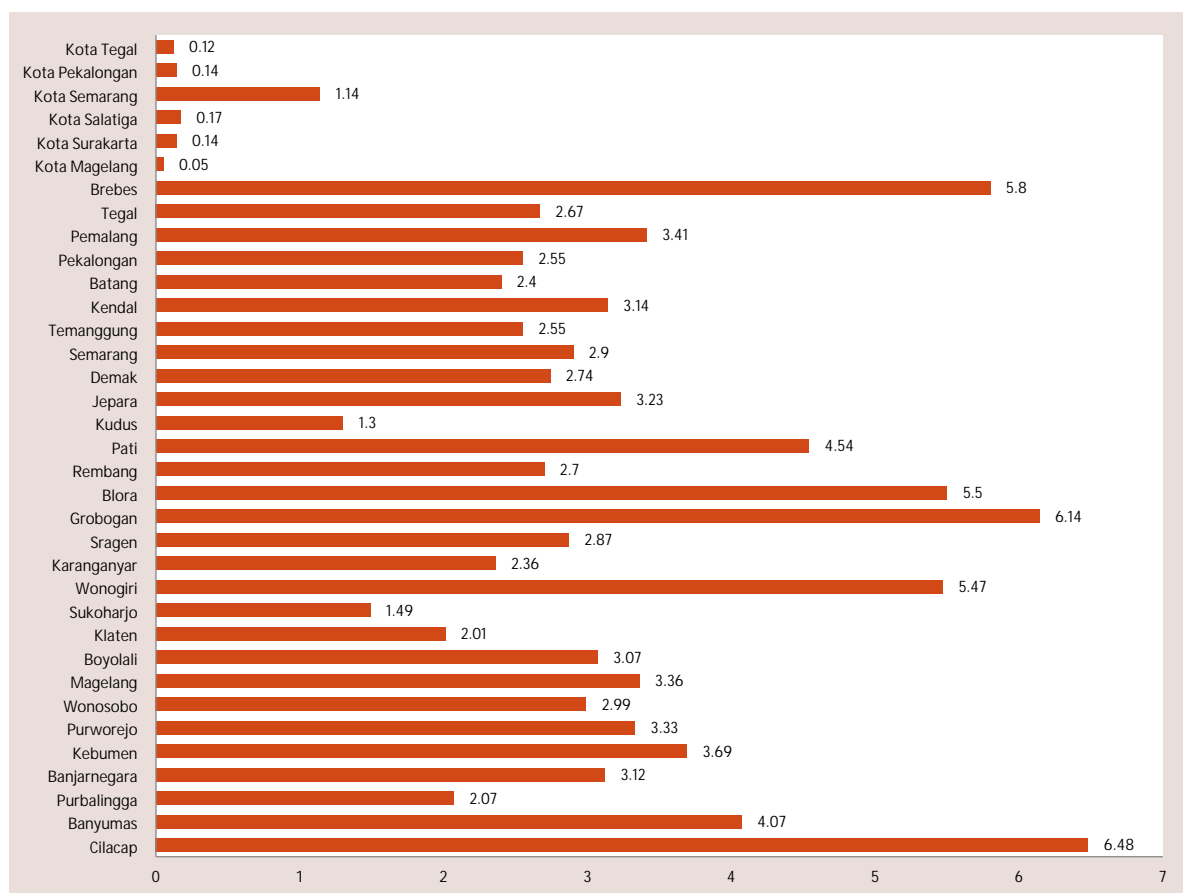
No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap Luas Provinsi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Cilacap	2.124,47	6,48
2	Banyumas	1.335,30	4,07
3	Purbalingga	677,55	2,07
4	Banjarnegara	1.023,73	3,12
5	Kebumen	1.211,74	3,69
6	Purworejo	1.091,49	3,33
7	Wonosobo	981,41	2,99
8	Magelang	1.102,93	3,36
9	Boyolali	1.008,45	3,07
10	Klaten	658,22	2,01
11	Sukoharjo	489,12	1,49
12	Wonogiri	1.793,67	5,47
13	Karanganyar	775,44	2,36
14	Sragen	941,54	2,87
15	Grobogan	2.013,86	6,14
16	Blora	1.804,59	5,5
17	Rembang	887,13	2,7

# LAPORAN AKHIR

## STUDI PEMILIHAN LOKASI DAN KELAYAKAN RUMAH PRODUKSI BERSAMA (FACTORY SHARING) DI PROVINSI JAWA TENGAH

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap Luas Provinsi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
18	Pati	1.489,19	4,54
19	Kudus	425,15	1,3
20	Jepara	1.059,25	3,23
21	Demak	900,12	2,74
22	Semarang	950,21	2,9
23	Temanggung	837,71	2,55
24	Kendal	1.118,13	3,14
25	Batang	788,65	2,4
26	Pekalongan	837,00	2,55
27	Pemalang	1.118,03	3,41
28	Tegal	876,10	2,67
29	Brebes	1.902,37	5,8
30	Kota Magelang	16,06	0,05
31	Kota Surakarta	46,01	0,14
32	Kota Salatiga	57,36	0,17
33	Kota Semarang	373,78	1,14
34	Kota Pekalongan	45,25	0,14
35	Kota Tegal	39,68	0,12
	Provinsi Jawa Tengah	32.800,69	100,00

Sumber: Provinsi Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2021

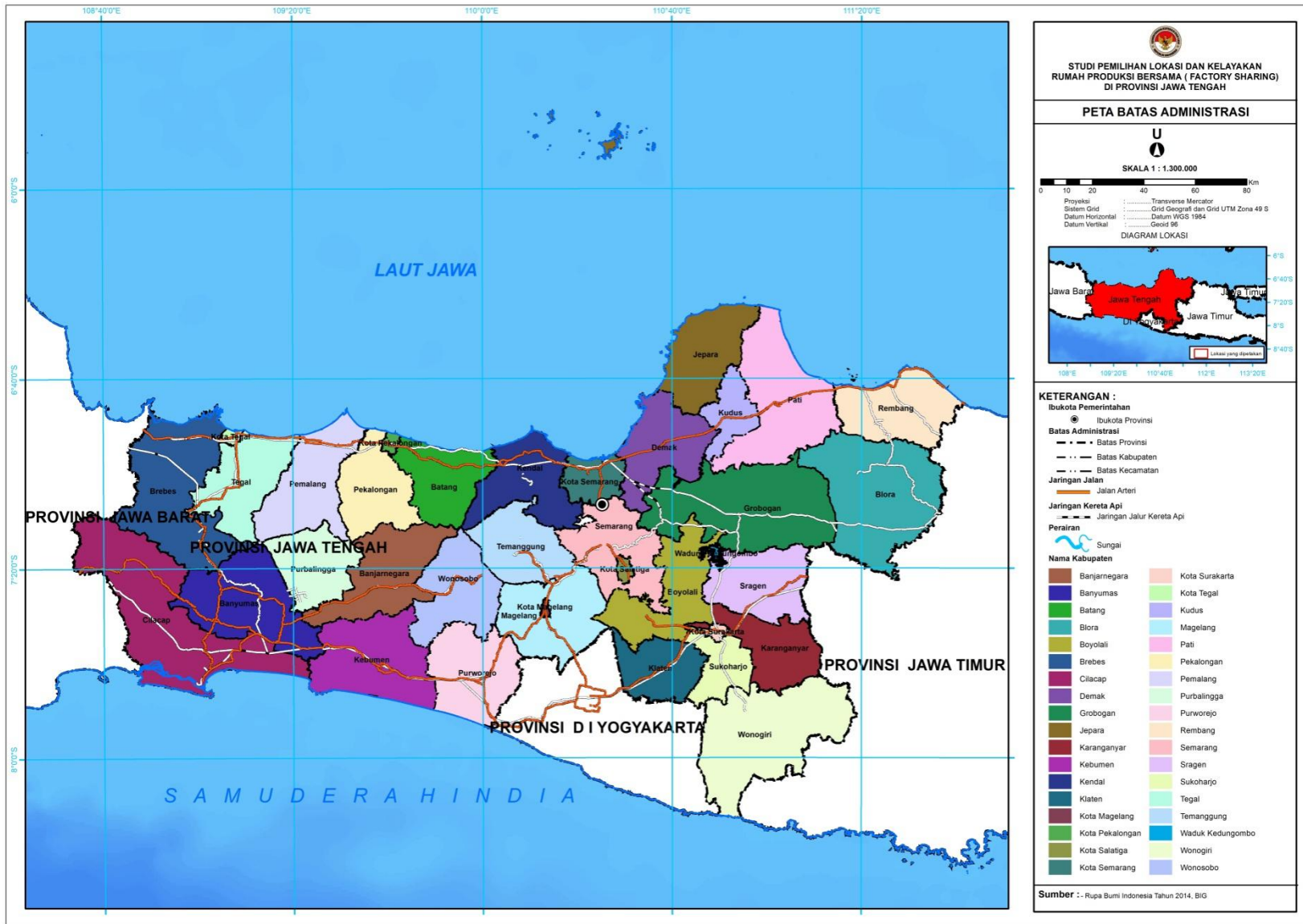


Gambar I.4. Diagram Persentase Luas Kabupaten/Kota terhadap Luas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Sumber: Olah Data, 2021

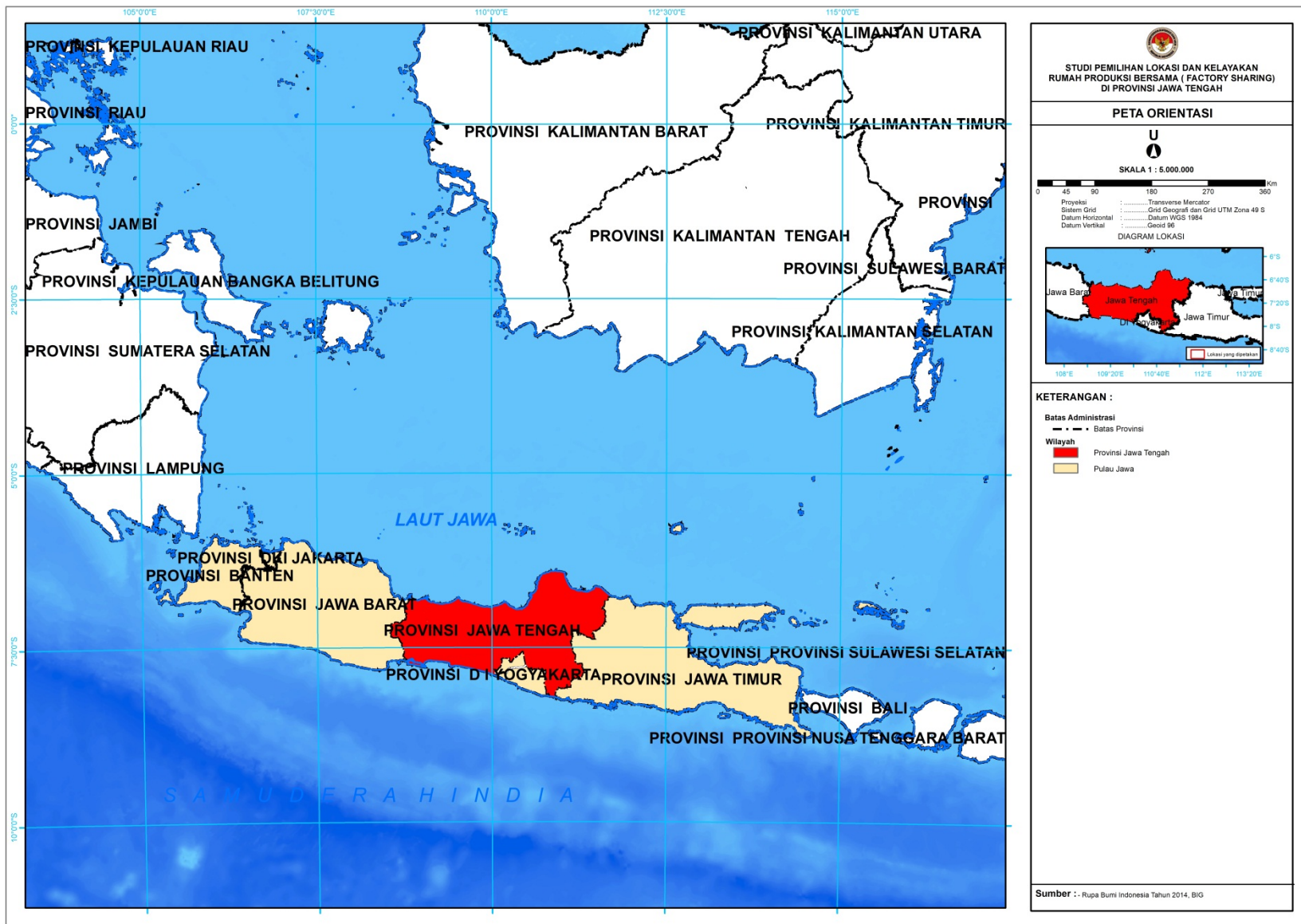


Berdasarkan data pada tabel dan diagram di atas dapat diketahui bahwa Kabupaten Cilacap merupakan wilayah Kabupaten paling luas dengan luas wilayah 2.124,47 km<sup>2</sup> atau 6,48% dari seluruh luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan wilayah Kota Magelang merupakan wilayah Kota yang paling kecil dengan luas wilayah 16,06 km<sup>2</sup> dengan cakupan 0,05% dari seluruh luas wilayah Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 1.5. Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Olah Data, 2021



Gambar I.6. Peta Orientasi Provinsi Jawa Tengah  
 Sumber: Olah Data, 2021

## 3.2. KONDISI FISIK

## 3.2.1. GEOLOGI DAN STRUKTUR TANAH

Formasi geologi Provinsi Jawa Tengah terdiri dari berbagai macam jenis geologi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2. Luas Geologi di Provinsi Jawa Tengah

Jenis Geologi (1)	Luas (Ha) (2)
Alluvial and Lake Deposits	1.357,60
Alluvial Fan Deposits	25.924,31
Alluvium	928.531,11
Alluvium and Coastal Deposits	943,72
Andesite	11.554,94
Andesite Porphyry and Lahar	3.226,98
Andong and Kendil Volcanics	4.235,38
Arjosari Formation	5.385,05
Avalanche Dep. (Ladus) From NueeArdente.	1.332,27
Basalt	561,79
Basalt and Chert	579,60
Baturetno Formation	16.474,77
Brecciated Rocks	3278,01
Bulu Formation	7.868,91
Butak Tuff	596,82
Candradimuka Lava	422,87
Cindercone Ash Deposits	2.472,72
Coastal Deposits	15.262,69
Condong Volcanic	331,91
Dacite	1.451,43
Damar Formation	54.083,43
Dayakan Formation	2.772,41
Diabase	19,57
Dieng Volcanics	13.119,91
Diorite	412,49
Diorite Rock	364,34
G. Slamet Lava	36.291,81
G. Slamet Undifferentiated Volcanics Rock	56.234,89
Gabon Formation	5.249,20
Gajah Mungkur Volcanic Rock	17.952,74
Genuk Volcanic Rocks	2.805,60
Gianti Volcanics	204,09
Gilipetung Volcanic	6.481,36
Gintung Formation	2.326,72
Greywacke	3.410,02



Jenis Geologi (1)	Luas (Ha) (2)
Halang Formation	214.629,58
Intrusive Rocks	720,03
Jampang Formation	1.373,98
Jaten Formation	415,45
Jembangan Volcanic	15.787,80
Jembangan Volcanics	97.986,89
Jobolarangan Breccia	6.001,57
Jobolarangan Lava	3.657,74
Jobolarangan Tuff	4.972,12
Jonggrangan Formation	1.067,04
Jongkong Formation	418,86
Kabuh Formation	2.665,79
Kalibeng Formation	10.2634,16
Kalibiuk Formation	7.181,64
Kaligesic Volcanics	9.178,24
Kaligetas Formation	70.606,47
Kaliglagah Formation	6.541,95
Kalipucang Formation	6.101,54
Karangsambung Formation	3.315,79
Karimunjawa Formation	2.466,08
Kebobutak Formation	28.353,80
Kekep volcanics	91,20
Kerek Formation	96.770,81
Kumbang Formation	70.541,58
Laharic Deposits of G. Slamet	30.425,34
Lasem Andesite	2.534,70
Lasem Volcanic Rock	7.537,49
Lava Dome and Flow	114,20
Lawak Formation	358,46
Lawu Lahar	134.349,04
Lawu Volcanic Rock	13.248,18
Ledok Formation	33.972,58
Lidah Formation	22.592,89
Ligung Formation	46.698,62
Linggopodo Formation	4.719,95
Lok Ulo Complex	2.630,54
Madura Formation	108,18
Mafic and Ultramafic Rocks	7.119,14
Mandalika Formation	14.645,94
Mengger Formation	649,02
Merapi Young Volcanic Deposits	60,87
Metamorphic rock	547,10

Jenis Geologi (1)	Luas (Ha) (2)
Mundu Formation	50.873,19
Mundu Formation	28.866,27
Muria Lava	15.226,22
Muria Tuff	115.594,35
Nampol Formation	11.787,92
Nanggulan Formation	25,52
Nglanggran Formation	2.532,55
Ngrayong Formation	28.979,44
Notopuro Formation	30.279,03
Nusakambangan Formation	10.499,74
Old eruption product of Slamet	33.828,11
Old Sumbing Volcanics	8.316,69
Old Sundoro Volcanics	1267,14
Old Volcanic Deposits of Merapi Volcano	3.031,50
Older Aluvium	389,61
Paciran Formation	10.205,08
Palu Granite	1,63
Pamutuan Formation	1.106,27
Parang Formation	1068,63
Pasean Formation	331,12
Patukbanteng-Jeding Morphocet	7.068,69
Payung Formation	846,88
Pelang Formation	369,74
Pemali Formation	5.496,68
Pendul Diorite	194,17
Peniron Formation	22.209,83
Penosogan Formation	13.670,26
Penyatan Formation	28.843,33
Pucangan Formation	4053,75
Rambatan Formation	37.896,66
Reef Limestone	16,16
Reefal Limestone	6,57
Sampung Formation	617,46
Schist and Phylite	280,52
Selerejo Formation	1.798,92
Selorejo Formation	4.997,53
Semilir Formation	27.835,58
Sentolo Formation	1.077,23
Serpentine	129,51
Sidoramping lava	5.278,29
Subang Formation	14,16
Sumbing Lava	1.885,28

Jenis Geologi (1)	Luas (Ha) (2)
Sumbing Volcanics	50.376,08
Sundoro Volcanics	35.128,75
Tambakromo Formation	40.505,68
Tapak Formation	58.068,31
Telemoyo Volcanics	2.611,24
Terrace Deposits	32.896,13
The Kemalon & Sangku Volcanic	25,86
Totogan Formation	6.175,35
Tuban Formation	15.237,29
Undifferentiated Igneous Rock	438,40
Undifferentiated Volcanic Rocks	220.891,97
Undifferentiated Volcanic Rocks	732,41
Volcanic Breccia	4.559,10
Waturanda Formation	21.526,25
Waturonda Formation	2.434,74
Wonocolo Formation	54.066,14
Wonosari Formation	41.257,57
Wungkal Formation	21,62
Wuni Formation	2.910,02
Young Eruption Product of Ciremai	15.303,83
Provinsi Jawa Tengah	3.433.277,80

Sumber: Olah Data, 2021

Jenis tanah yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari berbagai macam jenis tanah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3. Luas Jenis Tanah di Provinsi Jawa Tengah

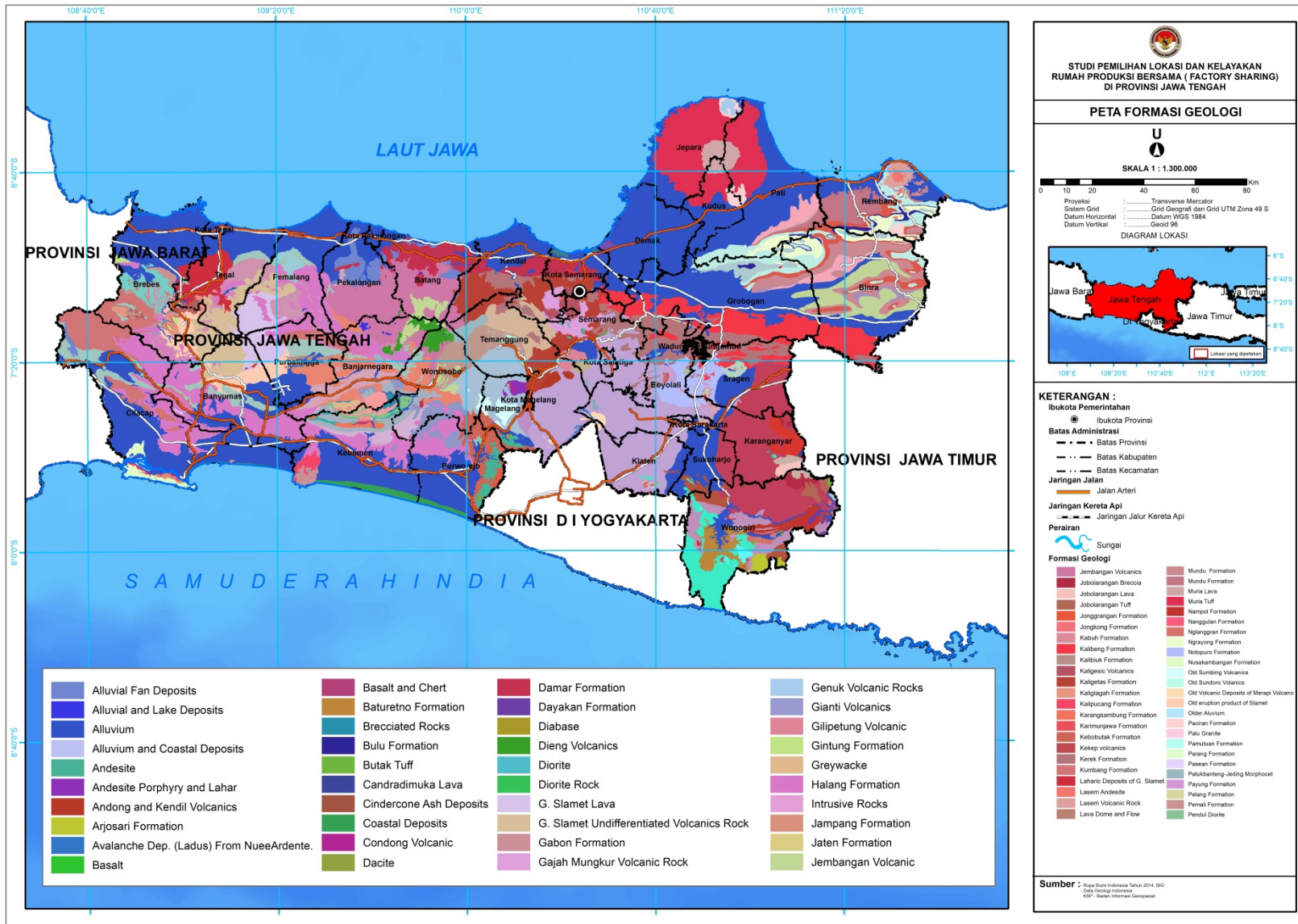
Jenis Tanah (1)	Luas (ha) (2)
Aluvial Distrik	16039,93
Aluvial Eutrik	12606,47
Aluvial Gleik	52033,34
Aluvial Hidrik	1818,46
Aluvial Sulfik	1785,71
Aluvial Tionik	5306,19
Aluvial Ustik	521,00
Andosol Distrik	86041,64
Andosol Eutrik	55967,29
Andosol Gleik	41963,50
Andosol Humik	16252,83
Andosol Litik	15193,77
Andosol Umbrik	166501,42
Andosol Ustik	9521,38

Jenis Tanah (1)	Luas (ha) (2)
Andosol Vitrik	5148,50
Bandar Udara	0,00
Galian/ Pertambangan	460,25
Gawir (Escarpmnts)	1809,76
Gleisol Distrik	137803,47
Gleisol Eutrik	516152,41
Gleisol Fluvik	32648,21
Gleisol Hidrik	26400,60
Gleisol Sulfidik	6564,00
Gleisol Vertik	76963,43
Grumusol Kromik	1116,41
Grumusol Pelik	15817,17
Grumusol Ustik	28860,82
Kambisol Distrik	152640,94
Kambisol Eutrik	644837,37
Kambisol Gleik	124913,36
Kambisol Humik	47538,76
Kambisol Kromik	78388,15
Kambisol Litik	97760,98
Kambisol Oksik	37247,78
Kambisol Rodik	12798,71
Kambisol Ustik	6779,29
Kambisol Vertik	52131,53
Latosol Eutrik	4592,72
Latosol Haplik	20154,65
Latosol Kromik	40270,08
Latosol Oksik	31785,43
Latosol Rodik	4805,13
Latosol Umbrik	2,78
Litosol	14457,83
Mediteran Gleik	5978,45
Mediteran Haplik	145348,53
Mediteran Kromik	5955,78
Mediteran Litik	1057,44
Mediteran Molik	1928,90
Mediteran Rodik	20711,47
Mediteran Ustik	43042,18
Mediteran Vertik	23317,84
Molisol Gleik	1965,04
Molisol Haplik	14043,98
Molisol Kromik	3149,30
Molisol Ustik	15138,37

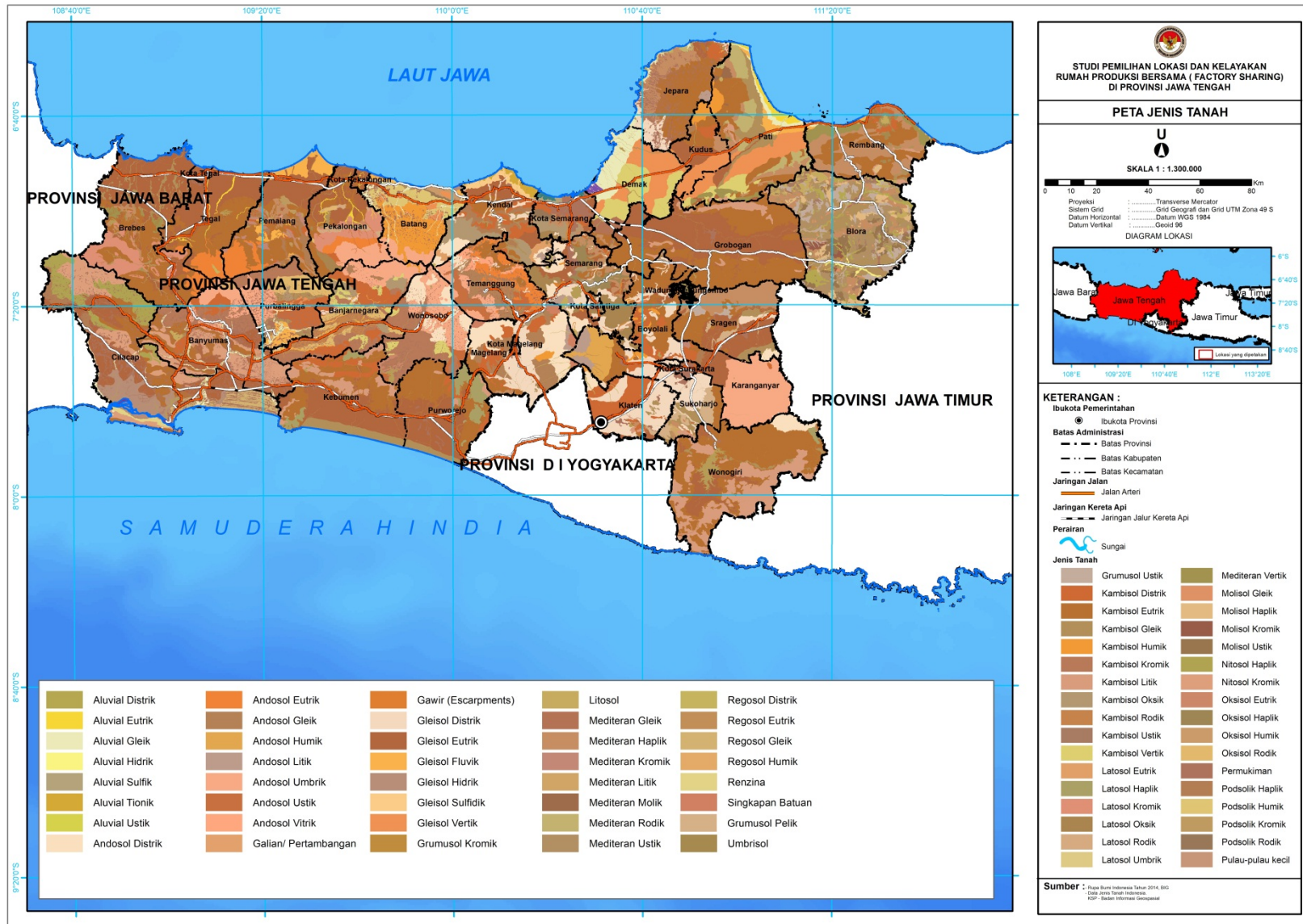


Jenis Tanah (1)	Luas (ha) (2)
Nitosol Haplik	33066,49
Nitosol Kromik	69210,20
Oksisol Eutrik	3260,61
Oksisol Haplik	10372,41
Oksisol Humik	3116,00
Oksisol Rodik	26252,53
Permukiman	169258,07
Podsolik Haplik	28964,82
Podsolik Humik	16975,91
Podsolik Kromik	2572,23
Podsolik Rodik	3393,44
Pulau-pulau kecil	4511,17
Regosol Distrik	4144,87
Regosol Eutrik	4906,13
Regosol Gleik	14686,38
Regosol Humik	1645,80
Renzina	3148,77
Singkapan Batuan	5829,91
Tubuh Air	40842,10
Umbrisol	3079,18
Provinsi Jawa Tengah	3433277,78

Sumber: Olah Data, 2021



Gambar I.7. Peta Geologi Provinsi Jawa Tengah  
Sumber: Olah Data, 2021



Gambar I.8. Peta Jenis Tanah Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Olah Data, 2021



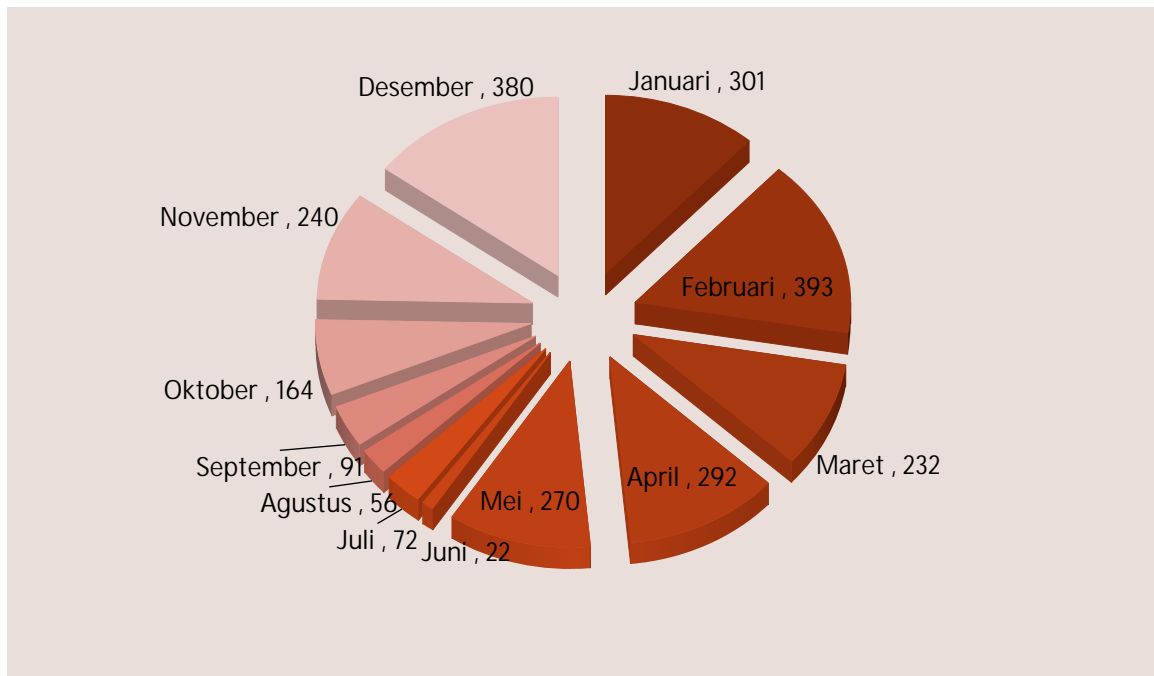
### 3.2.2. KLIMATOLOGI

Keadaan iklim di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.4. Kondisi Iklim di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

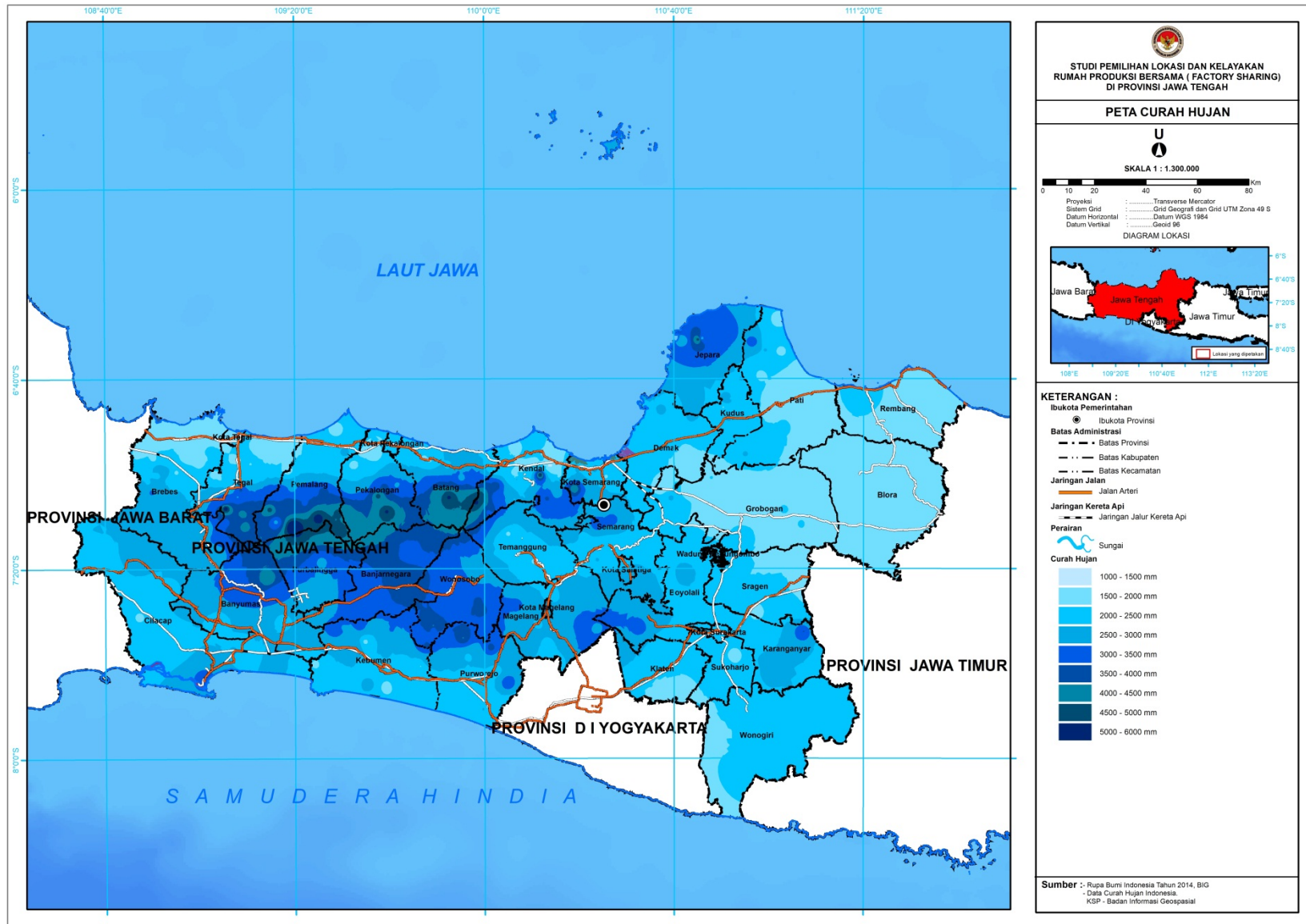
Unsur Iklim (1)	Banyaknya Curah Hujan (mm <sup>3</sup> ) (2)	Banyaknya Hari Hujan (hari) (3)
Januari	301	19
Februari	393	19
Maret	232	12
April	292	16
Mei	270	21
Juni	22	4
Juli	72	8
Agustus	56	3
September	91	8
Oktober	164	15
November	240	19
Desember	380	26

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka dalam Angka Tahun 2021



Gambar I.9. Diagram Curah Hujan di Provinsi Jawa Tengah





Gambar 1.10. Peta Curah Hujan Provinsi Jawa Tengah  
 Sumber: Olah Data, 2021

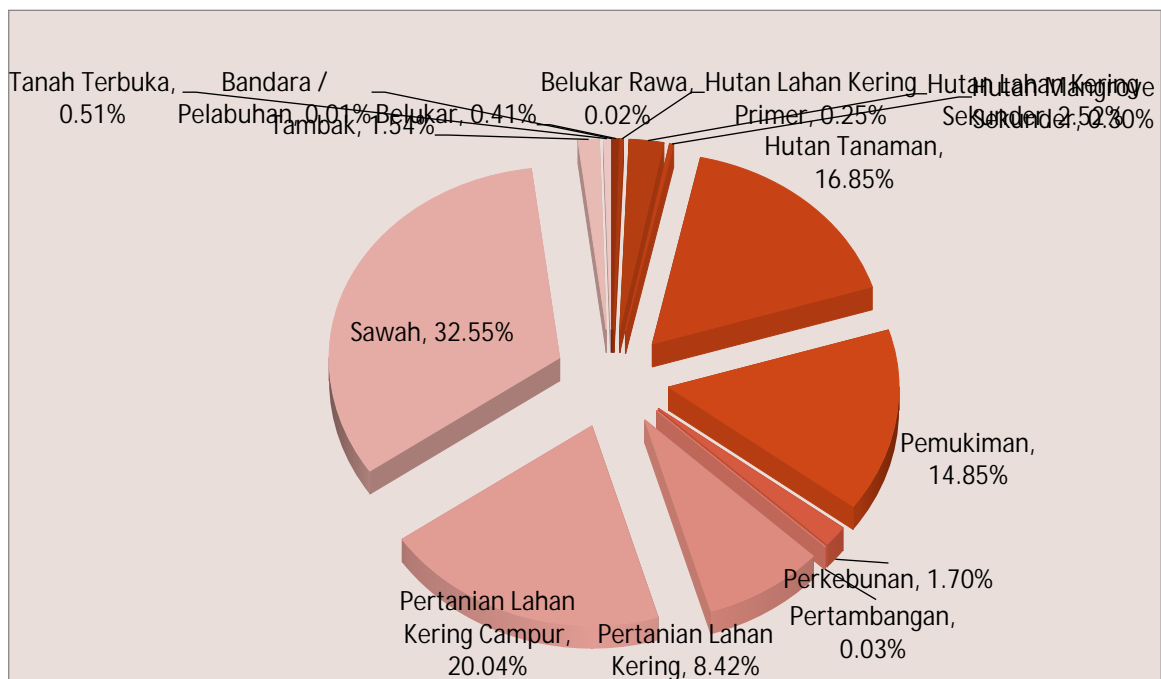
### 3.2.3. PENGGUNAAN LAHAN

Penggunaan lahan di Provinsi Jawa Tengah paling luas adalah sawah sebesar 1.081.598,83 ha sedangkan penggunaan lahan terkecil yaitu bandara/pelabuhan seluas 452,98 ha.

Tabel 4.5. Penggunaan Lahan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

No (1)	Penggunaan Lahan (2)	Luas (ha) (3)
1	Bandara / Pelabuhan	452,98
2	Belukar	13.685,13
3	Belukar Rawa	525,56
4	Hutan Lahan Kering Primer	8.160,97
5	Hutan Lahan Kering Sekunder	83.704,73
6	Hutan Mangrove Sekunder	9.936,04
7	Hutan Tanaman	560.099,13
8	Pemukiman	49.3382,13
9	Perkebunan	56.582,53
10	Pertambangan	1.114,01
11	Pertanian Lahan Kering	279.866,20
12	Pertanian Lahan Kering Campur	665.827,38
13	Sawah	1.081.598,83
14	Tambak	51.339,01
15	Tanah Terbuka	16.917,25
Provinsi Jawa Tengah		3.323.191,87

Sumber: Badan Informasi Geospasial, 2017



Gambar I.11. Diagram Persentase Luas Jenis Penggunaan Lahan di Provinsi Jawa Tengah (%)  
Sumber: Olah Data, 2021



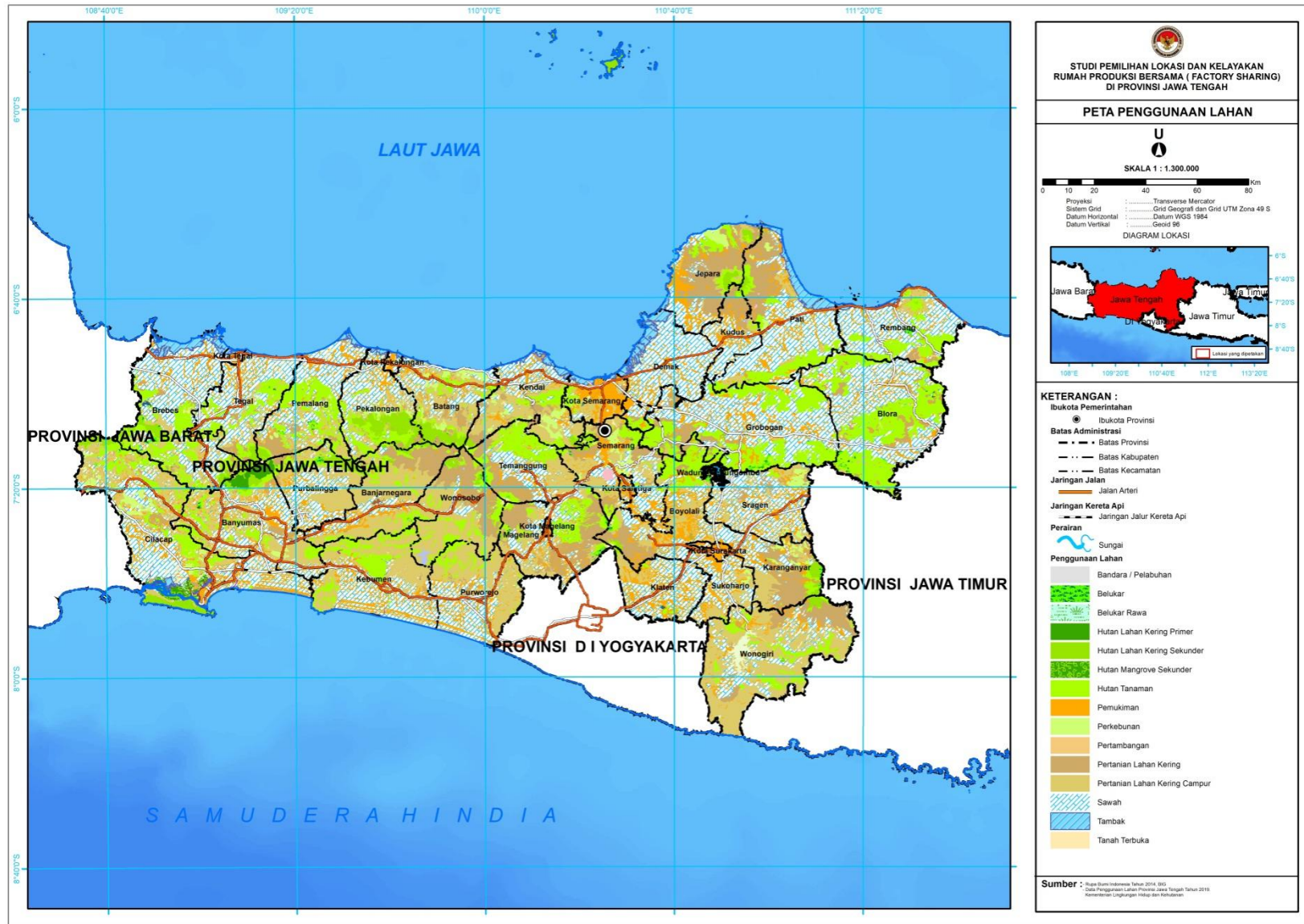


Gambar I.12. Penggunaan Lahan Pertanian di Provinsi Jawa Tengah  
Sumber: beritasatucom (Diakses pada tanggal 16 Mei 2021 pukul 11:29 WIB)



Gambar I.13. Penggunaan Lahan Perkotaan di Provinsi Jawa Tengah  
Sumber: regional.konten.co.id (Diakses pada tanggal 16 Mei 2021 pukul 11:31 WIB)





Gambar I.14. Peta Penggunaan Lahan Provinsi Jawa Tengah  
 Sumber: Olah Data, 2021



## 3.2.4. KEBENCANAAN

Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2021, dapat diketahui bahwa bencana alam yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 adalah tanah longsor dan banjir. Berikut merupakan tabel banyaknya kejadian bencana alam di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 4.1. Banyaknya Kejadian Bencana Alam Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

No (1)	Kabupaten/Kota (2)	Banyaknya Kejadian		
		Letusan Gunung Api (3)	Tanah Longsor (4)	Banjir (5)
1	Cilacap	-	30	20
2	Banyumas	-	18	11
3	Purbalingga	-	9	1
4	Banjarnegara	-	5	2
5	Kebumen	-	4	2
6	Purworejo	-	3	1
7	Wonosobo	-	5	-
8	Magelang	1	7	1
9	Boyolali	1	-	1
10	Klaten	1	-	2
11	Sukoharjo	1	-	2
12	Wonogiri	-	8	7
13	Karanganyar	-	7	-
14	Sragen	-	-	1
15	Grobogan	-	1	10
16	Blora	-	1	9
17	Rembang	-	2	2
18	Pati	-	2	8
19	Kudus	-	3	10
20	Jepara	-	5	4
21	Demak	-	-	4
22	Semarang	-	2	3
23	Temanggung	-	8	1
24	Kendal	-	9	9
25	Batang	-	-	3
26	Pekalongan	-	2	3
27	Pemalang	-	1	5
28	Tegal	-	15	5
29	Brebes	-	-	-
30	Kota Magelang	-	-	4
31	Kota Surakarta	1	-	-
32	Kota Salatiga	-	-	-
33	Kota Semarang	-	24	8
34	Kota Pekalongan	-	1	6
35	Kota Tegal	-	-	5
Provinsi Jawa Tengah		5	172	150

Sumber: Provinsi Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2021

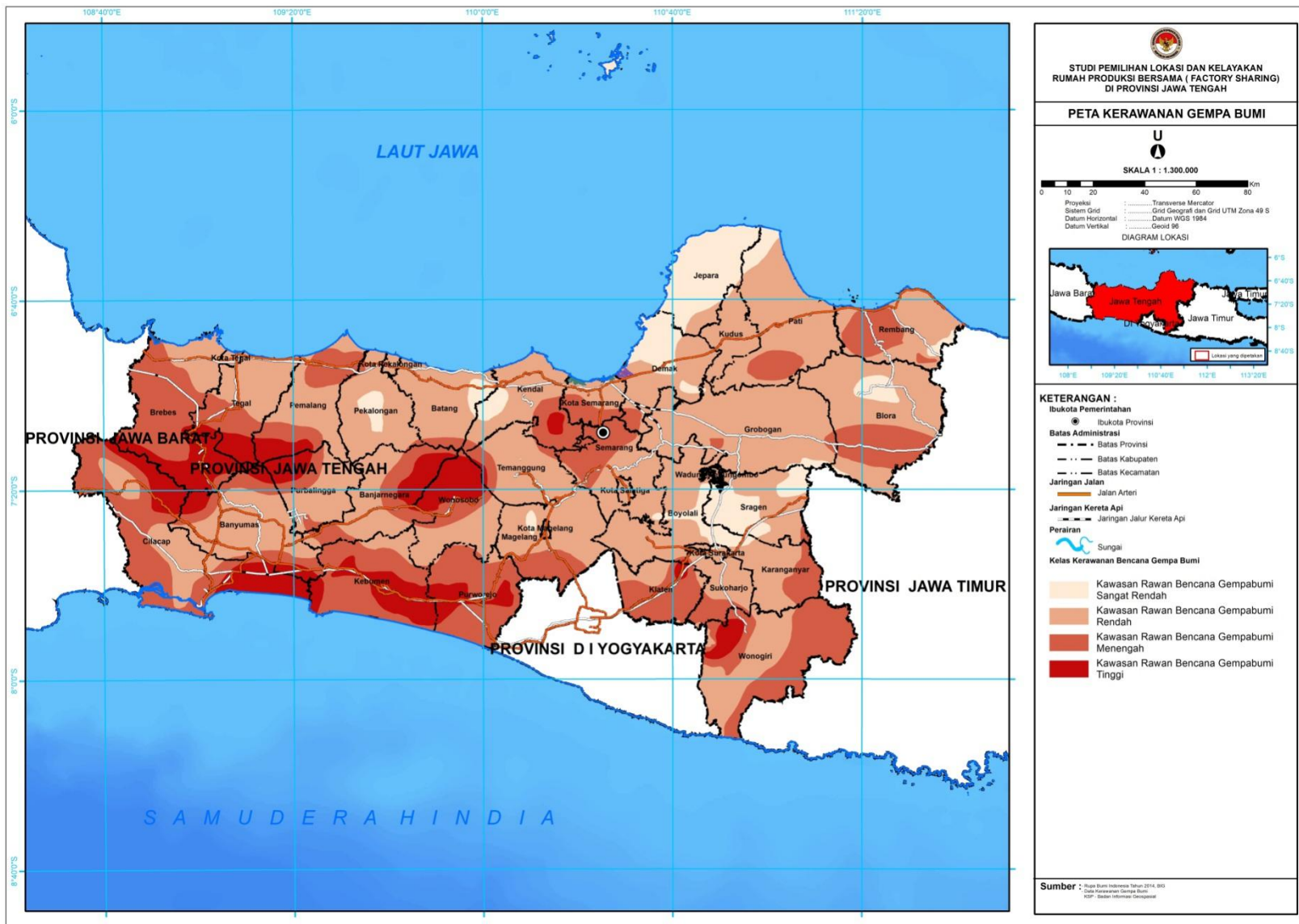


Gambar I.15. Dampak Bencana Tanah Longsor di Provinsi Jawa Tengah  
Sumber: halosemarang.com (Diakses pada tanggal 16 Mei 2021 pukul 13.30 WIB)

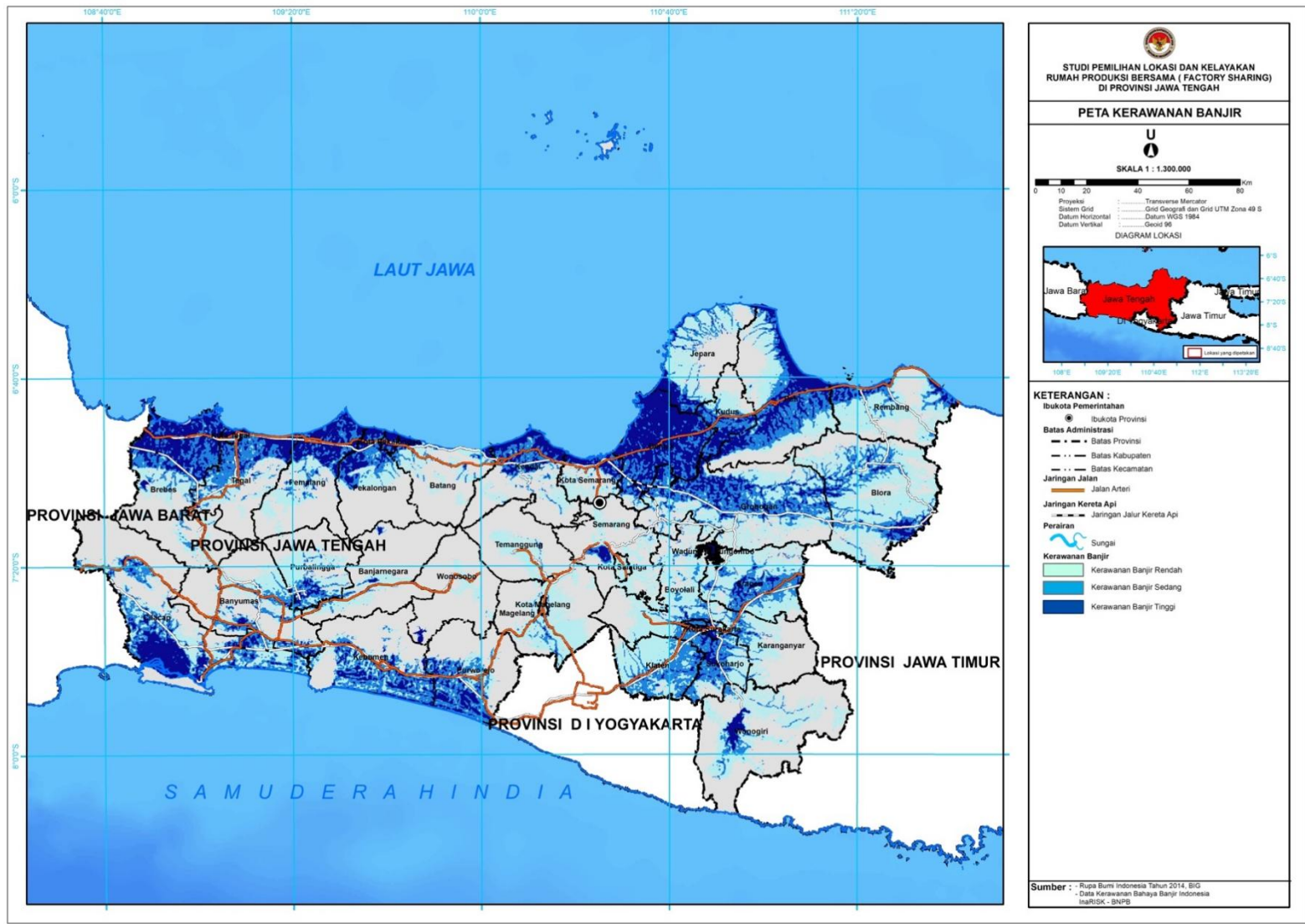


Gambar I.16. Bencana Banjir di Provinsi Jawa Tengah  
Sumber: minenews.id (Diakses pada tanggal 16 Mei 2021 pukul 13.27 WIB)



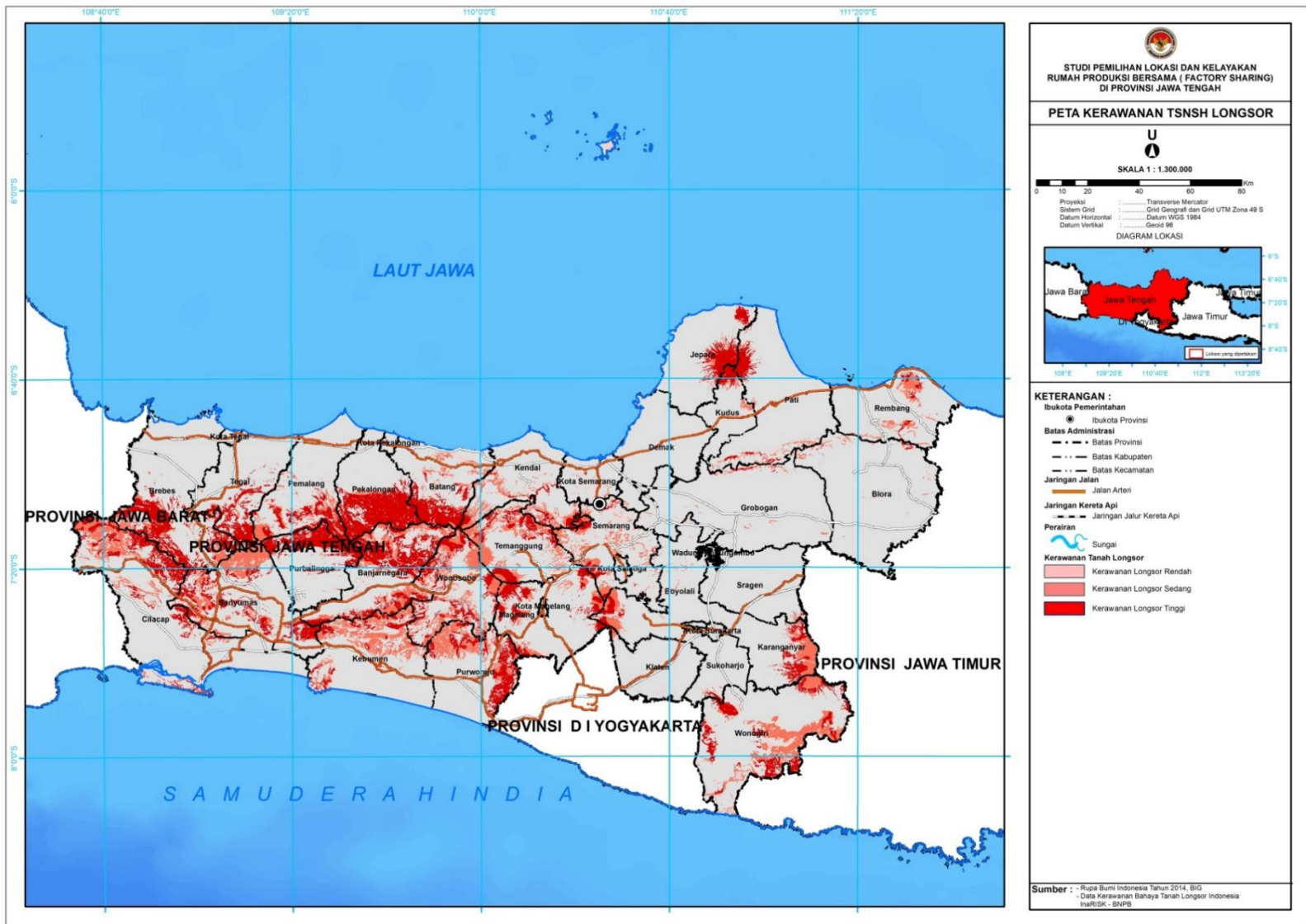


Gambar I.17. Peta Kerawanan Bencana Gempa Bumi Provinsi Jawa Tengah  
 Sumber: Olah Data, 2021



Gambar I.18. Peta Kerentanan Bencana Banjir di Provinsi Jawa Tengah  
Sumber: Olah Data, 2021





Gambar I.19. Peta Kerentanan Bencana Tanah Longsor di Provinsi Jawa Tengah  
 Sumber: Olah Data, 2021

## 3.3. KONDISI KEPENDUDUKAN

## 3.3.1. JUMLAH DAN KEPADATAN PENDUDUK

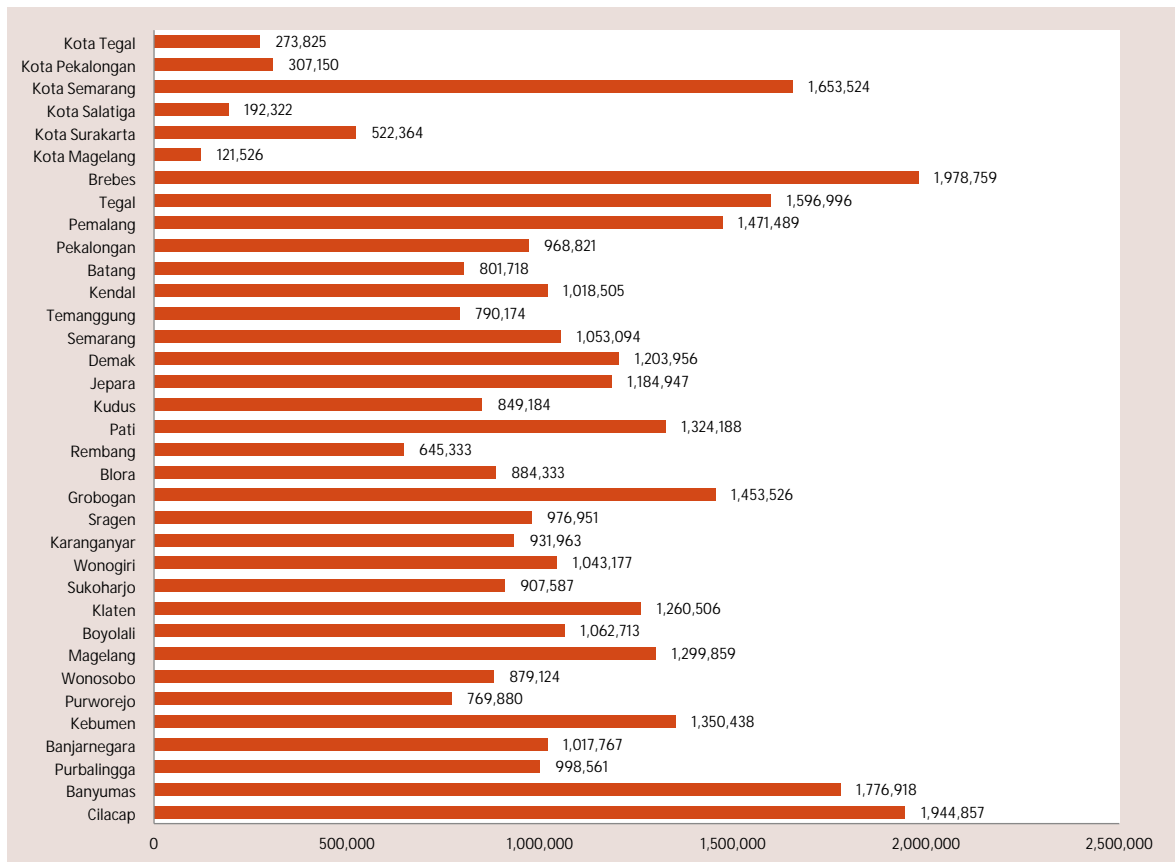
Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Tengah, jumlah penduduk pada tahun 2020 adalah 3.516.035 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kabupaten Brebes sebesar 1.978.759 jiwa dan paling sedikit di Kota Magelang sebesar 121.526 jiwa.

Tabel 4.6. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Cilacap	1.944.857	2.124,47	915
2	Banyumas	1.776.918	1.335,30	1331
3	Purbalingga	998.561	677,55	1.474
4	Banjarnegara	1.017.767	1.023,73	994
5	Kebumen	1.350.438	1.211,74	1.114
6	Purworejo	769.880	1.091,49	705
7	Wonosobo	879.124	981,41	896
8	Magelang	1.299.859	1.102,93	1.179
9	Boyolali	1.062.713	1.008,45	1.054
10	Klaten	1.260.506	658,22	1.915
11	Sukoharjo	907.587	489,12	1.856
12	Wonogiri	1.043.177	1.793,67	582
13	Karanganyar	931.963	775,44	1.202
14	Sragen	976.951	941,54	1.038
15	Grobogan	1.453.526	2.013,86	722
16	Blora	884.333	1.804,59	490
17	Rembang	645.333	887,13	727
18	Pati	1.324.188	1.489,19	889
19	Kudus	849.184	425,15	1.997
20	Jepara	1.184.947	1.059,25	1.119
21	Demak	1.203.956	900,12	1.338
22	Semarang	1.053.094	950,21	1.108
23	Temanggung	790.174	837,71	943
24	Kendal	1.018.505	1.118,13	911
25	Batang	801.718	788,65	1.017
26	Pekalongan	968.821	837,00	1.157
27	Pemalang	1.471.489	1.118,03	1.316
28	Tegal	1.596.996	876,10	1.823
29	Brebes	1.978.759	1.902,37	1.040
30	Kota Magelang	121.526	16,06	7567
31	Kota Surakarta	522.364	46,01	11.353
32	Kota Salatiga	192.322	57,36	3.353

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33	Kota Semarang	1.653.524	373,78	4.424
34	Kota Pekalongan	307.150	45,25	6.788
35	Kota Tegal	273.825	39,68	6.901
Provinsi Jawa Tengah		3.516.035	32.800,69	107

Sumber: Provinsi Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2021



Gambar 1.20. Diagram Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

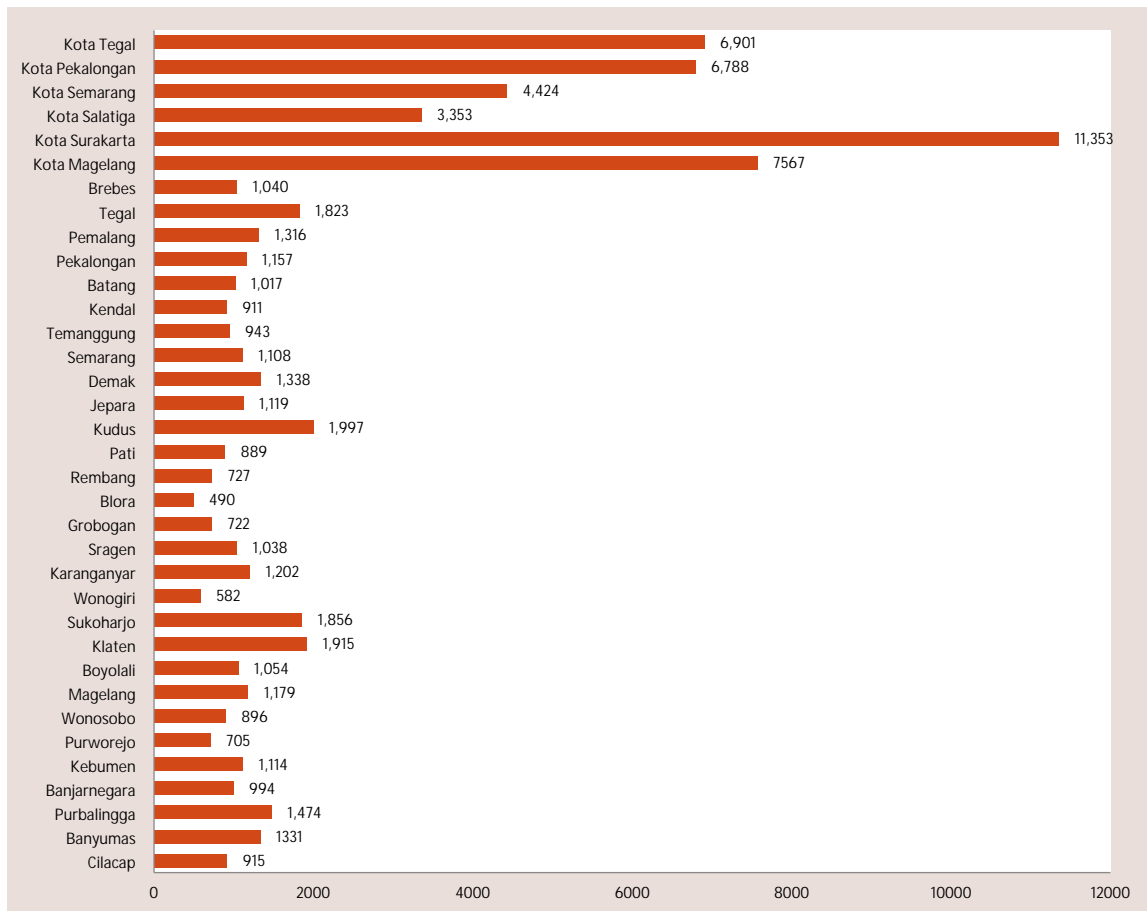
Sumber: Olah Data, 2021

Adapun dilihat dari kepadatannya, Provinsi Jawa Tengah memiliki rata-rata kepadatan 107 jiwa/Km<sup>2</sup> dengan wilayah terpadat berada di Kota Surakarta dan terendahnya di Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan klasifikasi SNI-03-1733-2004, angka kepadatan yang ada di Provinsi Jawa Tengah tergolong ke 4 jenis kepadatan.

Tabel 4.7. Klasifikasi Kepadatan Penduduk

Klasifikasi Kawasan	Kepadatan			
	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepadatan Penduduk	< 150 jiwa/ha	151 – 200 jiwa/ha	201 – 400 jiwa/ha	> 400 jiwa/ha

Sumber: SNI-03-1733-2004



Gambar I.21. Diagram Kepadatan Penduduk di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020  
Sumber: Olah Data, 2021

### 3.3.2. PERTUMBUHAN PENDUDUK

Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. Terhitung laju pertumbuhan penduduk tahun 2010-2020 sebesar 1,17%. Kabupaten Cilacap memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi yaitu 1,65%. Sedangkan Kota Magelang memiliki laju pertumbuhan terendah yaitu 0,27%.

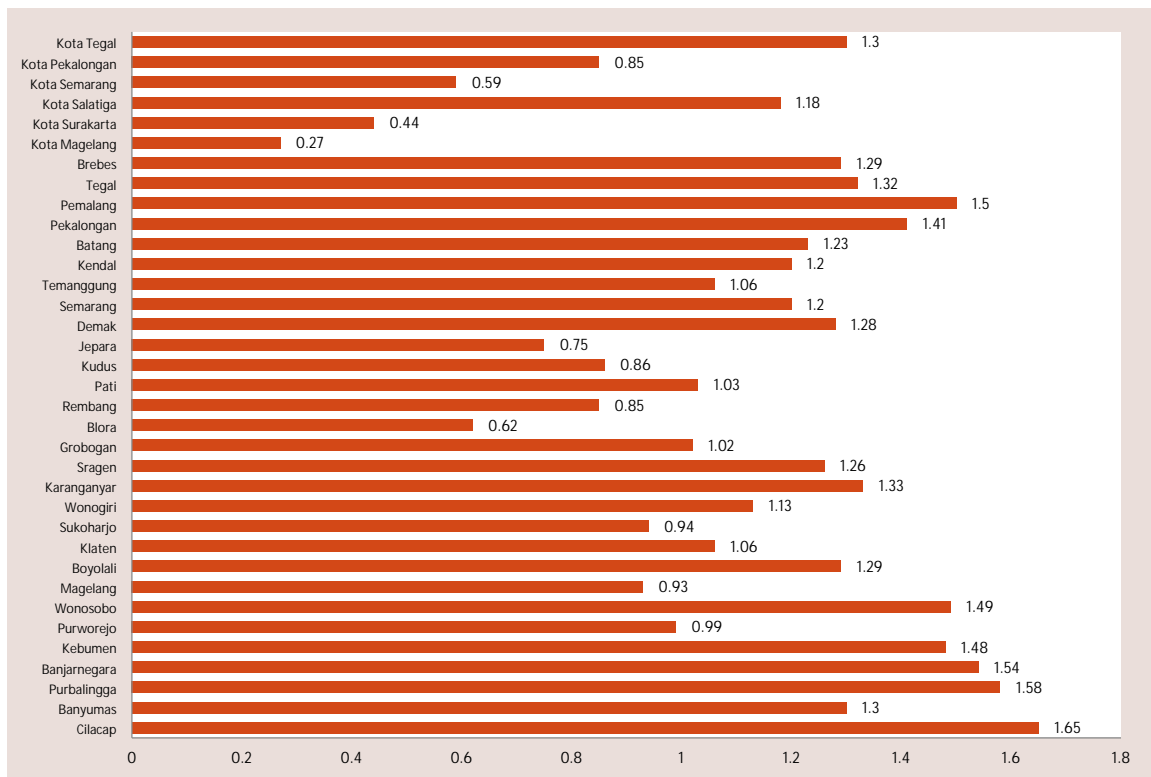
Tabel 4.8. Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2020

No (1)	Kabupaten/Kota (2)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%) (3)
1	Cilacap	1,65
2	Banyumas	1,30
3	Purbalingga	1,58
4	Banjarnegara	1,54
5	Kebumen	1,48
6	Purworejo	0,99
7	Wonosobo	1,49
8	Magelang	0,93
9	Boyolali	1,29
10	Klaten	1,06
11	Sukoharjo	0,94



No (1)	Kabupaten/Kota (2)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%) (3)
12	Wonogiri	1,13
13	Karanganyar	1,33
14	Sragen	1,26
15	Grobogan	1,02
16	Blora	0,62
17	Rembang	0,85
18	Pati	1,03
19	Kudus	0,86
20	Jepara	0,75
21	Demak	1,28
22	Semarang	1,20
23	Temanggung	1,06
24	Kendal	1,20
25	Batang	1,23
26	Pekalongan	1,41
27	Pemalang	1,50
28	Tegal	1,32
29	Brebes	1,29
30	Kota Magelang	0,27
31	Kota Surakarta	0,44
32	Kota Salatiga	1,18
33	Kota Semarang	0,59
34	Kota Pekalongan	0,85
35	Kota Tegal	1,30
	Provinsi Jawa Tengah	1,17

Sumber: Provinsi Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2021



Gambar I.22. Diagram Laju Pertumbuhan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2020

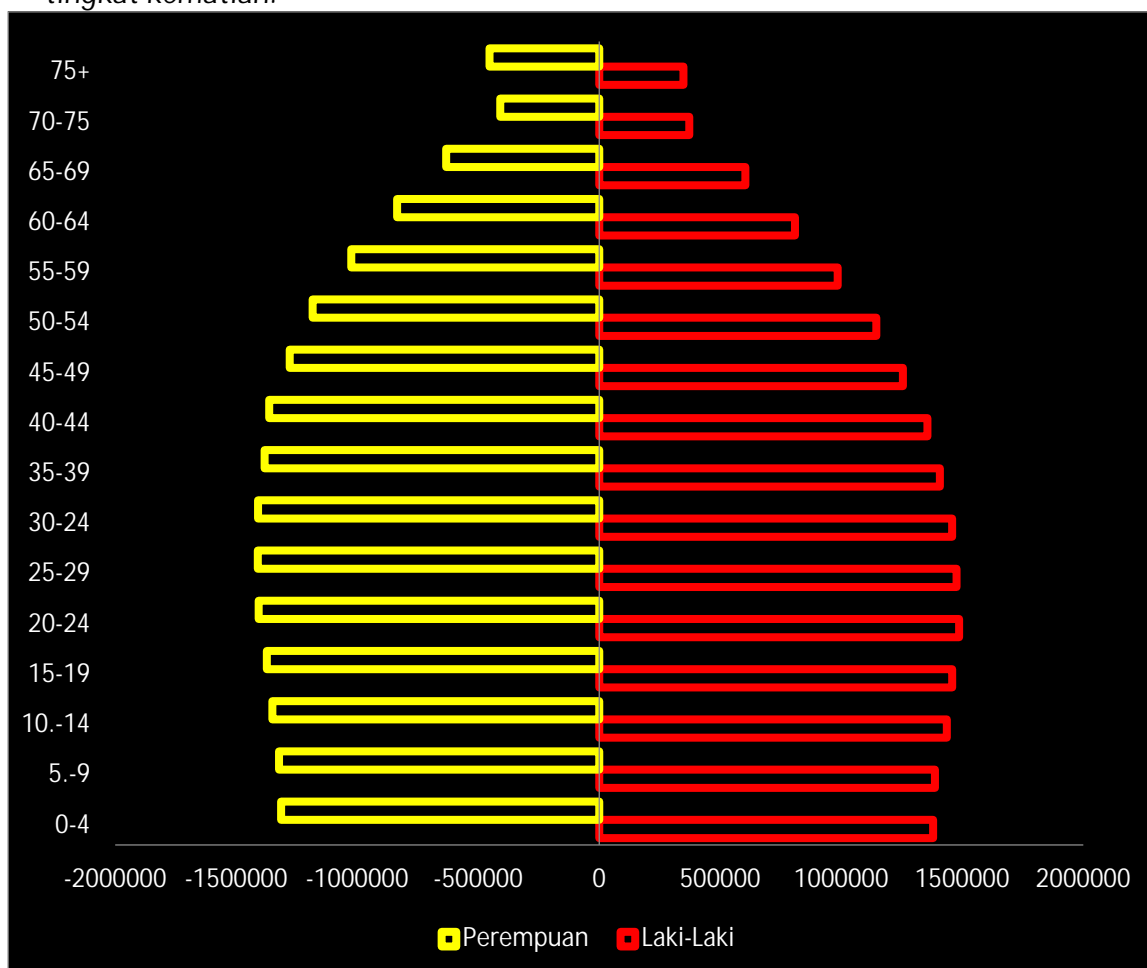
Sumber: Olah Data, 2021

### 3.3.3. STRUKTUR PENDUDUK

Struktur penduduk Provinsi Jawa Tengah dijabarkan menjadi penduduk menurut usia dan jenis kelamin, serta penduduk menurut mata pencaharian atau pekerjaan.

#### A. Penduduk menurut Usia dan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk menurut kelompok usia dan jenis kelamin di wilayah Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh penduduk usia produktif 15-<65 tahun dengan proporsi 69,85%. Pada tahun 2020 tercatat penduduk berjenis kelamin laki-laki atau pria berjumlah 18.362.143 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 18.153.892 jiwa. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa piramida penduduk Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 berbentuk stasioner yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia muda lebih banyak daripada penduduk usia tua yang pada umumnya disebabkan oleh tingkat kelahiran lebih besar daripada tingkat kematian.



Gambar I.23. Piramida Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Sumber: Olah Data, 2020

#### B. Penduduk menurut Usia Produktif

Penduduk Provinsi Jawa Tengah yang didominasi usia produktif yang mencapai 69,85%, memiliki tingkat persentase bekerja yang tinggi sebesar 93,52% dan tingkat pengangguran berada di angka 6,48%.

### 3.4. KONDISI SOSIAL BUDAYA

#### 3.4.1. PENDIDIKAN

Tabel 4.9. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Jenjang Pendidikan (1)	APM (2)	APK (3)
SD/MI	97,90	106,32
SMP/MTs	80,53	93,21
SMA/SMK/MA	59,74	84,83

Sumber: Provinsi Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2020

Tingginya angka APM di Provinsi Jawa Tengah berhubungan dengan jumlah sarana pendidikan yang tersedia pada masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 4.10. Jumlah Sarana Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020/2021

Kabupaten/Kota (1)	Sekolah									
	TK (2)	RA (3)	SD (4)	MI (5)	SMP (6)	MTs (7)	SMA (8)	SMK (9)	MA (10)	PT (11)
Cilacap	361	181	1.031	194	195	74	42	67	30	12
Banyumas	625	147	817	184	155	57	37	81	21	24
Purbalingga	264	248	468	184	77	41	16	34	12	1
Banjarnegara	305	262	630	202	98	40	12	25	17	3
Kebumen	590	108	763	113	119	91	23	65	27	7
Purworejo	410	42	520	48	89	18	23	41	10	5
Wonosobo	340	119	460	97	103	47	16	30	15	3
Magelang	435	428	602	312	130	72	37	45	19	3
Boyolali	552	177	593	208	97	49	30	42	18	2
Klaten	597	366	751	85	117	21	26	49	8	6
Sukoharjo	359	204	449	83	77	18	28	32	9	10
Wonogiri	506	62	773	5	118	23	21	45	7	2
Karanganyar	557	80	500	71	80	27	15	33	6	5
Sragen	536	91	577	80	91	29	21	56	10	3
Grobogan	727	120	801	99	136	102	34	57	43	2
Blora	519	72	597	77	95	56	24	55	13	3
Rembang	367	60	374	48	56	46	14	26	21	2
Pati	533	228	677	212	90	138	25	47	64	5
Kudus	221	118	424	145	50	67	17	29	37	8
Jejara	467	172	598	198	97	116	23	49	69	5
Demak	462	146	490	135	82	133	32	57	75	1
Semarang	405	203	500	164	101	42	26	43	10	3
Temanggung	325	190	434	146	78	34	16	21	18	3
Kendal	482	54	575	99	107	47	34	49	16	3
Batang	286	125	459	124	72	35	15	28	14	1
Pekalongan	335	109	510	122	85	35	18	33	16	4
Pemalang	354	56	747	99	116	50	23	51	17	2
Tegal	329	134	695	180	113	77	26	64	16	8

Kabupaten/Kota	Sekolah									
	TK	RA	SD	MI	SMP	MTs	SMA	SMK	MA	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Brebes	455	178	895	218	152	104	32	94	31	8
Kota Magelang	57	15	76	2	20	3	13	19	2	3
Kota Surakarta	269	34	247	10	73	8	33	49	6	43
Kota Salatiga	83	32	89	13	27	5	7	19	3	5
Kota Semarang	675	135	509	92	192	39	74	86	30	63
Kota Pekalongan	84	26	102	47	28	11	8	13	9	3
Kota Tegal	71	18	136	18	34	5	11	21	1	7
Jumlah	13943	4740	18869	4168	3350	1760	852	1555	720	268

Sumber: Provinsi Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2021



Gambar 1.24. Salah Satu Sarana Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah  
Sumber: jateng.tribunnews.com (Diakses pada 16 Mei 2021 pukul 10.41 WIB)

### 3.4.2. KESEHATAN

Fasilitas kesehatan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Rumah Sakit (RS), RS Bersalin, Poliklinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Apotek.

Tabel 4.11. Jumlah Fasilitas Kesehatan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Fasilitas Kesehatan					
	RS	RS Bersalin	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Cilacap	12	-	72	39	77	104
Banyumas	27	-	65	40	38	150



Kabupaten/Kota	Fasilitas Kesehatan					
	RS	RS Bersalin	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Purbalingga	6	-	21	22	45	51
Banjarnegara	4	-	15	35	39	47
Kebumen	11	-	26	35	72	74
Purworejo	10	-	17	27	61	42
Wonosobo	4	-	15	24	42	34
Magelang	5	-	21	29	62	54
Boyolali	10	-	33	26	34	72
Klaten	11	-	73	35	85	126
Sukoharjo	9	-	48	13	56	96
Wonogiri	7	1	40	39	138	48
Karanganyar	7	-	49	22	59	74
Sragen	9	2	75	28	55	81
Grobogan	7	-	45	31	56	81
Blora	4	-	18	26	53	41
Rembang	3	-	4	17	70	41
Pati	10	-	41	30	48	102
Kudus	9	-	35	20	42	58
Jejara	7	2	42	21	47	81
Demak	4	-	50	27	50	56
Semarang	5	-	50	26	68	53
Temanggung	4	-	11	26	39	42
Kendal	5	-	38	30	51	76
Batang	3	-	11	21	41	40
Pekalongan	2	-	19	27	45	51
Pemalang	7	-	32	25	66	76
Tegal	8	8	44	31	57	98
Brebes	11	-	34	39	61	92
Kota Magelang	6	-	7	5	11	13
Kota Surakarta	14	-	35	17	21	48
Kota Salatiga	5	-	12	6	18	13
Kota Semarang	23	-	100	35	38	129
Kota Pekalongan	9	-	7	14	19	23
Kota Tegal	3	-	11	8	20	19
Jumlah	281	13	1216	896	1784	22286

Sumber: Provinsi Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2021



Gambar 1.25. Salah Satu Sarana Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah  
 Sumber: halodoc.com (Diakses pada 16 Mei 2021 pukul 10.46 WIB)

### 3.4.3. AGAMA

Penduduk Provinsi Jawa Tengah mayoritas beragama Islam dengan jumlah 35.607.889 jiwa dan jumlahnya merata di seluruh Kabupaten/Kota.

Tabel 4.12. Jumlah Penduduk menurut Agama yang Dianut di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Agama					
	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Cilacap	1.793.687	15.947	15.628	210	1.463	100
Banyumas	1.774.332	17.980	11.293	1.230	3.172	300
Purbalingga	1.002.668	4.900	2.337	142	416	250
Banjarnegara	1.020.982	3.922	1.565	150	549	-
Kebumen	1.348.975	8.362	3.818	380	6.500	-
Purworejo	787.877	21.423	11.562	121	275	200
Wonosobo	881.117	7.366	3.816	1.270	557	-
Magelang	1.321.129	18.506	37.186	235	936	-
Boyolali	1.015.209	16.148	7.889	4.330	9.256	-
Klaten	1.361.096	36.944	43.492	14.780	416	-
Sukoharjo	880.092	30.000	12.980	550	835	-
Wonogiri	1.024.898	12.870	9.439	143	6.240	-
Karanganyar	843.207	20.648	8.236	5.720	841	-
Sragen	902.532	13.919	5.700	3.785	728	-
Grobogan	1.351.429	13.425	3.625	890	624	50
Blora	1.238.647	9.169	3.971	152	732	60

Kabupaten/Kota	Agama					
	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rembang	614.281	2.760	2.582	190	416	160
Pati	1.173.337	29.658	2.693	130	9.800	-
Kudus	847.394	26.812	5.265	73	832	-
Jepara	1.170.243	21.734	916	860	11.960	30
Demak	1.148.902	6.659	585	109	208	-
Semarang	934.325	35.218	23.329	1.000	850	60
Temanggung	789.364	15.647	7.860	525	8.694	-
Kendal	984.325	4.358	6.728	489	260	-
Batang	795.676	1.376	1.801	73	221	-
Pekalongan	943.379	1.349	837	650	213	-
Pemalang	1.463.939	4.390	1.680	268	92	-
Tegal	1.616.006	3.575	2.981	274	267	150
Brebes	1.937.772	3.496	1.851	140	209	-
Kota Magelang	112.601	11.495	9.165	175	214	400
Kota Surakarta	440.245	78.756	40.491	4.630	1.000	400
Kota Salatiga	196.082	31.776	10.231	180	616	-
Kota Semarang	1.338.855	111.712	130.886	23.740	1.654	1.000
Kota Pekalongan	286.912	6.877	4.077	218	578	200
Kota Tegal	265.915	5.104	3.448	75	416	600
Jumlah	35.607.889	654.271	438.853	67.887	72.040	3.960

Sumber: Provinsi Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2021

Demi menunjang kebutuhan kegiatan ibadah, Provinsi Jawa Tengah memiliki fasilitas rumah ibadah untuk penduduk masing-masing agama. Berikut data persebaran rumah ibadah pada setiap Kabupaten/Kota menurut kelompok agama.

Tabel 4.13. Jumlah Rumah Peribadatan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Kabupaten/ Kota	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Pura	Vihara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Cilacap	2.296	4.812	113	6	1	19
Banyumas	2.305	5.720	111	14	2	21
Purbalingga	1.123	2.577	24	6	-	1
Banjarnegara	1.777	3.500	28	3	1	9
Kebumen	1.685	4.066	62	6	1	19
Purworejo	1.315	2.364	89	23	-	13
Wonosobo	1.433	1.065	38	8	2	10
Magelang	3.251	3.260	64	43	-	9
Boyolali	2.635	2.565	175	18	24	28
Klaten	3.077	1.811	139	64	47	3
Sukoharjo	1.084	266	132	3	5	5
Wonogiri	2.605	1.121	108	46	2	24
Karanganyar	2.669	561	173	18	22	5
Sragen	1.945	1.057	100	18	10	4
Grobogan	1.552	5.874	100	11	4	6
Blora	1.113	3.456	55	2	-	4
Rembang	594	2.832	37	8	-	10
Pati	1.158	2.950	191	6	2	39
Kudus	716	2.319	57	4	-	17

Kabupaten/ Kota (1)	Masjid (2)	Mushola (3)	Gereja Protestan (4)	Gereja Katholik (5)	Pura (6)	Vihara (7)
Jepara	1.096	3.728	107	3	4	37
Demak	1.626	3.758	44	1	-	2
Semarang	799	2.726	328	30	3	56
Temanggung	1.625	2.059	97	16	-	87
Kendal	902	3.232	46	16	4	5
Batang	868	3.343	23	3	-	1
Pekalongan	824	2.491	17	2	3	2
Pemalang	933	2.990	30	5	1	2
Tegal	1.136	2.345	17	5	3	1
Brebes	1.297	4.905	15	2	-	1
Kota Magelang	159	75	40	2	-	5
Kota Surakarta	554	152	192	6	2	12
Kota Salatiga	246	324	96	2	1	9
Kota Semarang	1.445	1.316	300	25	5	23
Kota Pekalongan	160	674	9	1	1	7
Kota Tegal	200	271	23	1	1	5
Jumlah	48.203	86.565	3.180	152	152	501

Sumber: Provinsi Jawa tengah dalam Angka Tahun 2021



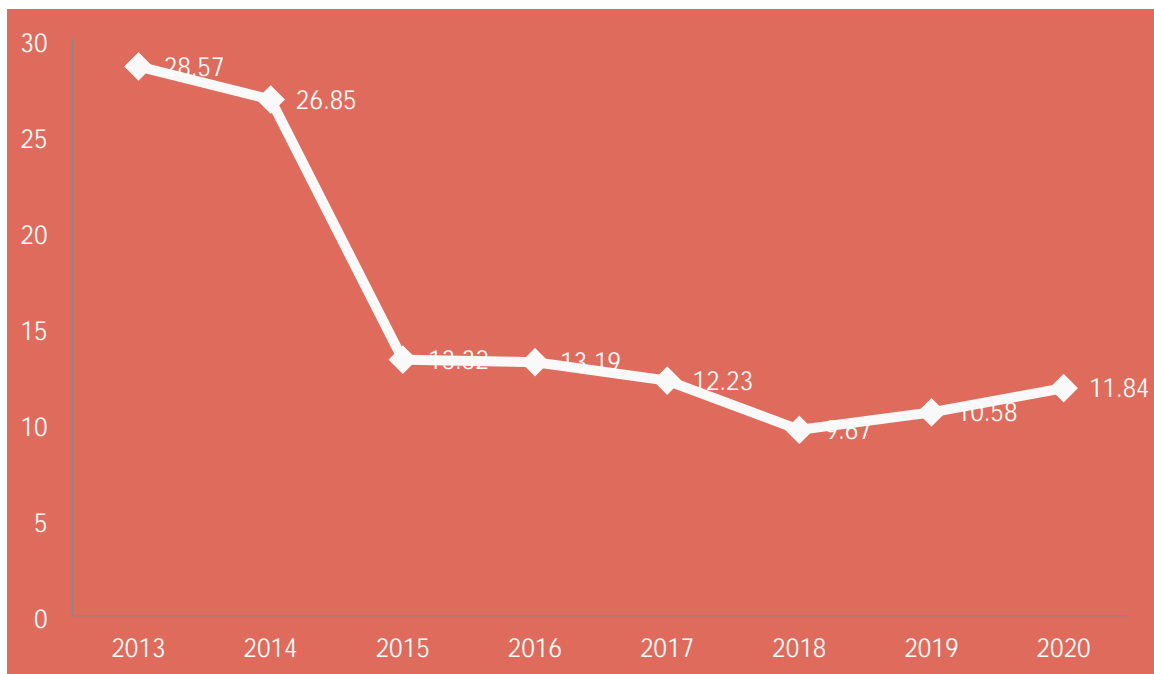
Gambar I.26. Salah Satu Sarana Peribadatan di Provinsi Jawa Tengah



Sumber: [republika.co.id](http://republika.co.id) (Diakses pada 16 Mei 2021 pukul 10.49 WIB)

### 3.4.4. KEMISKINAN

Jumlah penduduk yang tidak mampu atau pra sejahtera di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 adalah 11,84 ribu jiwa. Dalam kurun waktu 7 tahun yaitu tahun 2013-2020 jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah terus mengalami penurunan, namun pada tahun 2019 menuju tahun 2020 justru mengalami peningkatan.



Gambar 1.27. Grafik Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2020  
Sumber: Olah Data, 2021



Gambar I.28. Potret Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah  
Sumber: zonapasar.com (Diakses pada 16 Mei 2021 pukul 10.52 WIB)

### 3.5. KONDISI PEREKONOMIAN

#### 3.5.1. INDUSTRI MIKRO DAN KECIL

Jenis sarana perdagangan di Provinsi Jawa Tengah berupa Pasar, Toko, Kios dan Warung. Berikut ini data jumlah sarana perdagangan yang ada di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2020.

Tabel 4.14. Jumlah Pedagang di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2020

No (1)	Klasifikasi Industri (2)	Perusahaan (3)	Tenaga Kerja (4)
1	Makanan	291.499	603.867
2	Minuman	7.969	15.707
3	Pengolahan Tembakau	59.216	280.157
4	Tekstil	56.163	94.732
5	Pakaian Jadi	172.310	300.635
6	Kulit, Barang dari ulit dan alas kaki	4.522	9.664
7	Kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furniture) dan barang anyaman bambu, rotan, dan sejenisnya	128.481	199.904
8	Kertas dan barang dari kertas	3.146	4.138
9	Percetakan dan reproduksi	3.871	8.541
10	Produk dari batu bara dan pengilangan minyak	-	-
11	Bahan kimia dan barang dari bahan kimia	1.395	2.919
12	Farmasi produk obat kimia dan obat tradisional	1.718	2.942
13	Karet, barang dari karet dan plastik	2.590	3.163
14	Barang galian bkan logam	48.454	109.350
15	Logam dasar	337	867

No (1)	Klasifikasi Industri (2)	Perusahaan (3)	Tenaga Kerja (4)
16	Barang logam, bukan mesin dan peralatannya	17.176	44.127
17	Komputer, barang elektronik dan optik	164	186
18	Peralatan listrik	141	549
19	Mesin dan perlengkapan ytdl	428	1.334
20	Kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer	325	1.268
21	Alat angkutan lainnya	627	2.255
22	Furnitur	41.752	94.250
23	Pengolahan lainnya	68.583	93.296
24	Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	554	1.075
Provinsi Jawa Tengah		912.421	1.874.926

Sumber: Provinsi Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2021

### 3.5.2. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Kinerja perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat tren ekonomi antara lain distribusi dan laju pertumbuhan PDRB.

Menurut Sirusa BPS, distribusi PDRB merupakan persentase besaran PDRB suatu wilayah terhadap jumlah wilayah secara keseluruhan. Semakin besar distribusi PDRB, maka semakin besar pula peranannya terhadap perekonomian dalam cakupan wilayah yang lebih makro. Pada tahun 2021, nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah adalah 345.614.940,26 juta rupiah. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa sektor yang menyumbang PDRB terbesar adalah sektor industri pengolahan sebesar 117.695.236,20 juta rupiah (34,05%), disusul sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 47.652.641,39 juta rupiah (13,79%), dan ketiga sektor konstruksi sebesar 36.593.591,37 juta rupiah (10,59%).

Tabel 4.15. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2021

Lapangan Usaha (1)	PDRB Provinsi Jawa Tengah		
	PDRB (Juta Rupiah) (2)	Laju PDRB (%) (3)	Distribusi PDRB (%) (4)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	51.076.240,75	18,33	14,78
Pertambangan dan Penggalian	8.591.894,16	2,20	2,49
Industri Pengolahan	117.695.236,20	0,02	34,05
Pengadaan Listrik dan Gas	338.055,73	-0,04	0,10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	220.712,82	0,99	0,06
Konstruksi	36.593.591,37	-2,59	10,59
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	47.652.641,39	1,47	13,79
Transportasi dan Pergudangan	7.773.513,94	-0,71	2,25
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10.566.896,04	0,51	3,06
Informasi dan Komunikasi	14.731.149,84	0,02	4,26



Lapangan Usaha (1)	PDRB Provinsi Jawa Tengah		
	PDRB (Juta Rupiah) (2)	Laju PDRB (%) (3)	Distribusi PDRB (%) (4)
Jasa Keuangan dan Asuransi	10.403.400,51	0,88	3,01
Real Estat	5.878.538,05	0,72	1,70
Jasa Perusahaan	1.422.194,42	0,66	0,41
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	8.627.506,78	-6,69	2,50
Jasa Pendidikan	15.611.997,40	-5,00	4,52
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.322.782,43	-7,49	0,96
Jasa Lainnya	5.108.588,43	-2,10	1,48
Produk Domestik Regional Bruto	345.614.940,26	1,69	100,00

Sumber: Provinsi Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2021

### 3.6. POTENSI DAERAH

#### 3.6.1. INFRASTRUKTUR WILAYAH

Berdasarkan Provinsi Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2021, kondisi jalan yang berada di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan kelas jalan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.16. Panjang Jalan menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 (Km)

Tingkat Kewenangan (1)	2018 (2)	2019 (3)	2020 (4)
Negara	1.471,32	1.518,00	1.518,00
Provinsi	2.527,51	2.500,60	2.500,64
Kabupaten/Kota	26.397,07	26.648,37	26.648,28
Provinsi Jawa tengah	30,395,91	30.666,96	30.666,92

Sumber: Provinsi Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2021





Gambar 1.29. Keberadaan Jalan di Provinsi Jawa Tengah

Sumber: *superapps.kompas.com* (Diakses pada 16 Mei 2021 pukul 10.59 WIB)

Tabel 4.17. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Provinsi Jawa Tengah (Km)

Kondisi Jalan (1)	2020 (2)
Baik	15.432
Sedang	4.636
Rusak	3.240
Rusak berat	26.790
<b>Total</b>	<b>50.098</b>

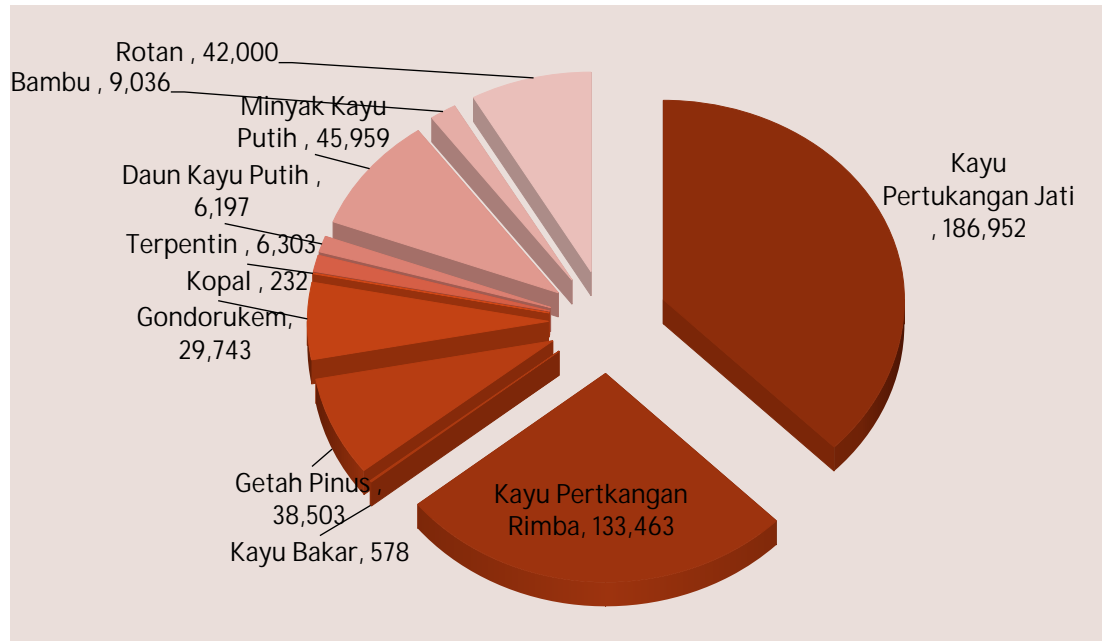
Sumber: Provinsi Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2021

### 3.6.2. KEHUTANAN

Tabel 4.18. Produksi Hasil hutan Menurut Jenis Produksi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020

Jenis Produksi (1)	Satuan Unit (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)
Kayu Pertukangan Jati	m <sup>3</sup>	160.950	174.658	186.952
Kayu Pertkangan Rimba	m <sup>3</sup>	93.708	101.788	133.463
Kayu Bakar	Stapel meter (sm)	1.136	853	578
Getah Pinus	Ton	43.175	42.649	38.503
Gondorukem	Ton	28.470	32.451	29.743
Kopal	Ton	226	241	232
Terpentin	Ton	6.127	6.240	6.303
Daun Kayu Putih	Ton	5.861	8.033	6.197
Minyak Kayu Putih	Kg	46.232	62.186	45.959
Bambu	Batang	6.000	2.655	9.036
Rotan	Batang	106.245	122.719	42.000

Sumber: Provinsi Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2021



Gambar I.30. Grafik Produksi Hasil Hutan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020  
Sumber: Olah Data, 2021



Gambar I.31. Pertanian Tanaman Biofarmaka  
Sumber: rimbakita.com (Diakses pada 16 Mei 2021 pukul 11.08 WIB)

### 3.6.3. PARIWISATA

Obyek wisata di Provinsi Jawa Tengah terdiri atas Lawang Sewu, Simpang Lima, Tugu Muda, Kampung Warna, Sam Poo Kong dan lain sebagainya .

Tabel 4.19. Jumlah Kunjungan Wisatawan menurut di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2020

Jenis Wisatawan	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Wisatawan Nusantara	40.118.470	49.943.607	57.900.863	22.629.085
Wisatawan Mancanegara	782.107	677.168	691.699	78.290
Provinsi Jawa Tengah	40.900.577	50.620.775	58.592.562	22.707.375

Sumber: Provinsi Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2021



Gambar I.32. Obyek Wisata Lawang Sewu

Sumber: Liputan6.com (Diakses pada 16 Mei 2021, pukul 12:55)



Gambar I.33. Obyek Wisata Candi Borobudur

Sumber: jatengtoday.com (Diakses pada 16 Mei 2021, pukul 12:55)





Gambar I.34. Peta Persebaran Objek Wisata di Jawa Tengah  
 Sumber: petawisatadunia.com(diakses pada 16 Mei 2021 pukul 12.58 WIB)



### 3.7. JUSTIFIKASI PEMILIHAN LOKASI

Pada abad ke-15, rotan menjadi salah satu komoditas perdagangan penting dari trayek-trayek atau jalur utama perdagangan seperti Malaka – pantai timur Sumatera, Jawa Tengah dan Jawa Timur – Sumatera Selatan. Para pedagang Eropa yang masuk ke kawasan Nusantara pada awal abad ke-16 juga tertarik dengan komoditi rotan terutama VOC. Bahkan pada abad ke-18, Hindia Belanda menjadi pemasok terbesar komoditi rotan dunia. Namun pada waktu itu, ekspor bahan baku rotan masih jauh lebih besar daripada ekspor barang setengah jadi atau barang setengah jadi rotan.

Setelah Indonesia merdeka, industri pengolahan rotan baik untuk barang setengah jadi maupun barang jadi masih belum terlalu berkembang. Indonesia masih condong untuk mengekspor bahan mentah rotan. Pada dasawarsa 1970-an Indonesia menjadi pemasok sekitar 90% kebutuhan dunia akan rotan mentah. Dari jumlah itu, 90% rotan dihasilkan dari hutan tropis di pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Pada perdagangan ekspor rotan yang belum diproses tersebut, Indonesia hanya menghasilkan sekitar 15 juta USD.

Jumlah keuntungan tersebut membuktikan bahwa ekspor rotan masih belum optimal karena Indonesia masih bergantung pada ekspor bahan mentah rotan. Sementara itu, industri pengolahan rotan masih belum dikembangkan karena pemerintah belum menaruh perhatian serius terhadap pengembangan industri pengolahan rotan. Padahal, ekspor bahan jadi rotan memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi daripada ekspor bahan mentah rotan. Manfaat pengembangan industri pengolahan rotan yang berkualitas ekspor selain dapat memberi keuntungan lebih bagi kas negara, juga dapat mengurangi jumlah pengangguran yang semakin meningkat setiap tahun yang dipengaruhi tingginya pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia.

Pemerintah mulai menyadari nilai ekonomis yang lebih besar dari ekspor bahan jadi rotan pada tahun 1980-an. Hal ini dibuktikan dengan pelarangan ekspor bahan baku rotan pada tahun 1986. Pelarangan tersebut dilakukan untuk merangsang pengembangan industri rotan dan melindungi sumberdaya alam rotan tersebut. Ekspor produk barang jadi rotan Indonesia pernah mencapai nilai 370 juta USD pada tahun 1995.<sup>7</sup> Dengan adanya pelarangan tersebut, daerah sentra industri pengolahan rotan yang berorientasi ekspor di Indonesia seperti di Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Desa Trangsan, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah terus mengalami perkembangan.

Kerajinan rotan yang ada di Desa Trangsan, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah ini sudah ada sejak periode akhir zaman kolonial atau pada 1940-an. Berkat bantuan dari penguasa Keraton Kasunanan Surakarta, industri pengolahan rotan di Desa

Trangsan dapat berkembang. Bahkan desa ini berubah menjadi sentra industri pengolahan rotan terbesar di Jawa Tengah.

Oleh sebab itu, lokasi yang tepat untuk melakukan kegiatan Studi Pemilihan Lokasi dan Kelayakan Rumah Produksi Bersama (*Factory Sharing*) di Provinsi Jawa Tengah adalah Desa Trangsan, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.



Gambar I.35. Contoh Industri Rotan di Desa Trangsan, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah

Sumber: [solo.tribunnews.com](http://solo.tribunnews.com) (diakses pada 23 Juni 2021 pukul 11.04 WIB)



# BAB V

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 5.1.

### KESIMPULAN

Rumah produksi bersama (*factory sharing*) di Provinsi Jawa Tengah khususnya di Desa Trangsan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo ini berupa rumah produksi bersama rotan. Dengan dibangunnya rumah produksi bersama ini diharapkan dapat mampu membantu para UMKM rotan di Desa Trangsan dan sekitarnya dalam menyelesaikan permasalahan terbatasnya ketersediaan bahan baku rotan.

Berdasarkan analisis kelayakan yang telah dilakukan, Rumah produksi bersama (*factory sharing*) di Provinsi Jawa Tengah dikatakan layak dari aspek umum dan legalitas (umum dan kepatuhan), aspek sosial dan budaya, aspek teknik perencanaan, aspek pemasaran, aspek sumber daya manusia, aspek manajemen resiko, aspek lingkungan, aspek sumber daya alam, dan aspek finansial.

Studi Pemilihan Lokasi dan Kelayakan Rumah Produksi Bersama (*Factory Sharing*) di Provinsi Jawa Tengah ini telah dilakukan sesuai amanat Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri. Berikut adalah kesimpulan ditinjau dari aspek analisis studi pemilihan lokasi dan kelayakan Rumah Produksi Bersama:

Tabel 5.1. Penilaian Kelayakan Rumah Produksi Bersama (*Factory Sharing*) di Provinsi Jawa Tengah

Aspek Studi Kelayakan (1)	Keterangan (2)
Aspek Umum dan Legalitas (Hukum dan Kepatuhan)	Sesuai dengan RTRW Jawa Tengah dan RTRW Kabupaten Sukoharjo serta didukung oleh dokumen perencanaan lain seperti RUPM dan RPIK yang disusun oleh Kabupaten maupun Provinsi.
Aspek Sosial dan Budaya	Keberadaan UMKM Rotan dapat membantu perekonomian masyarakat Desa Trangsan dan sekitarnya dan berpotensi untuk dikembangkan.
Aspek Teknik Perencanaan	Pemenuhan kebutuhan bahan baku rotan akhir-akhir ini mengalami kendala dimana bahan baku rotan dengan kriteria yang dibutuhkan cukup langka sehingga dapat

Aspek Studi Kelayakan (1)	Keterangan (2)
	menghambat produksi kerajinan rotan, sehingga perlu adanya rumah produksi bersama. Berdasarkan penilaian lokasi calon rumah produksi bersama industri rotan yang memiliki peringkat tertinggi yaitu lokasi I. Namun berdasarkan kesepakatan, lokasi yang akan digunakan yaitu lokasi IV.
Aspek Pemasaran	Selama ini, industri rotan di Desa Trangsas belum memiliki showroom sebagai tempat pemasaran produk <i>furniture</i> dan kerajinan rotan, oleh karena itu perlu penyediaan showroom di Desa Trangsas yang menjadi salah satu bagian dari Rumah Produksi Bersama ( <i>Factory Sharing</i> ).
Aspek Sumber Daya Manusia	Keberadaan Rumah Produksi Bersama ( <i>Factory Sharing</i> ) nantinya juga harus memiliki pengelola diantaranya: direktur, manajer keuangan, manajer kepegawaian, manajer perencanaan, manajer produksi, manajer penjualan, serta staf-staf lainnya.
Aspek Manajemen Resiko	Pengelolaan Rumah Produksi Bersama ( <i>Factory Sharing</i> ) yang baik dapat mengurangi resiko yang kemungkinan terjadi pada industri rotan.
Aspek Lingkungan	Adanya Rumah Produksi Bersama ( <i>Factory Sharing</i> ) perlu melakukan inovasi untuk diversifikasi produk rotan dan pemanfaatan biomassa rotan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Aspek Sumber Daya Alam	Jenis-jenis rotan yang dapat diolah di Rumah Produksi Bersama ( <i>Factory Sharing</i> ) yaitu rotan mentah, rotan asalan, rotan <i>natural washed &amp; sulphured</i> , rotan poles, hati rotan, kulit rotan, dan serbuk rotan.
Aspek Finansial	Rumah Produksi Bersama ( <i>Factory Sharing</i> ) potensial untuk dikembangkan dengan memiliki nilai BCR>1, NPV positif, dan IRR lebih dari 10%.
Aspek Kebijakan	Calon lokasi pembangunan Rumah Produksi Bersama ( <i>Factory Sharing</i> ) tidak sesuai dengan rencana pola ruang Kabupaten Sukoharjo karena menempati Kawasan KP2B.

Sumber: Hasil Analisis, 2021

## 5.2.

### REKOMENDASI

Guna mendukung pembangunan Rumah produksi bersama (*factory sharing*) di Provinsi Jawa Tengah maka perlu didukung dengan berbagai kebijakan terkait penanaman modal, tata ruang, serta infrastruktur sebagai berikut:

#### 5.2.1. PENANAMAN MODAL

1. Perlu penyediaan data peruntukan lahan yang definitif untuk menjamin kepastian hukum terkait status tanah yang akan dikembangkan
2. Perlu penyediaan informasi yang jelas terkait kepastian hukum dan perizinan
3. Peningkatan potensi sumber daya tenaga kerja lokal



### 5.2.2. TATA RUANG

1. Perlu mengubah peruntukan di calon lokasi dari KP2B menjadi kawasan peruntukaan industri
2. Sebagaimana diamanatkan di dalam PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu dilakukan sinkronisasi antar dokumen kebijakan. Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu, dalam hal ini adalah RPJP, RPJM, RKP, RTRW, dan RDTR

### 5.2.3. INFRASTRUKTUR

1. Perlu dilakukan pengembangan jaringan limbah pada Rumah Produksi Bersama (*Factory Sharing*)
2. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas jalan, termasuk penambahan jalur perlambatan pada jalan nasional
3. Perlu dilakukan pengembangan sumber daya energi
4. Pengembangan jaringan persampahan
5. Pengembangan jaringan telekomunikasi

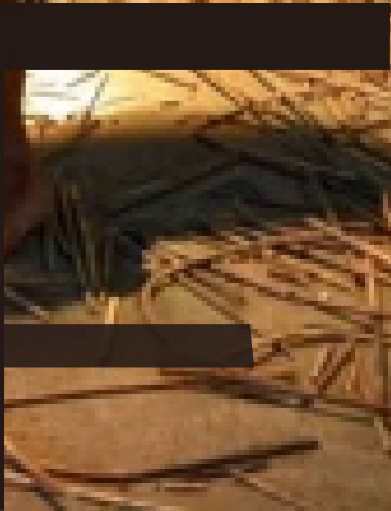
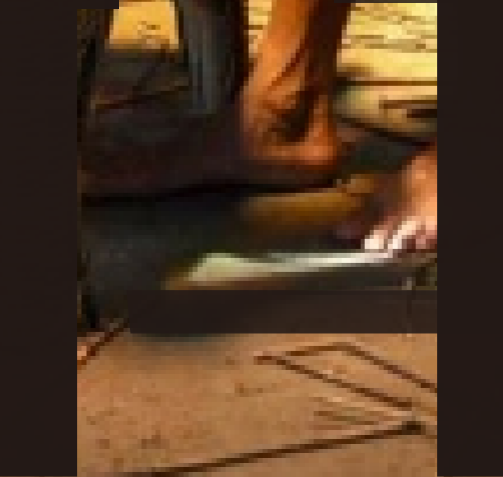
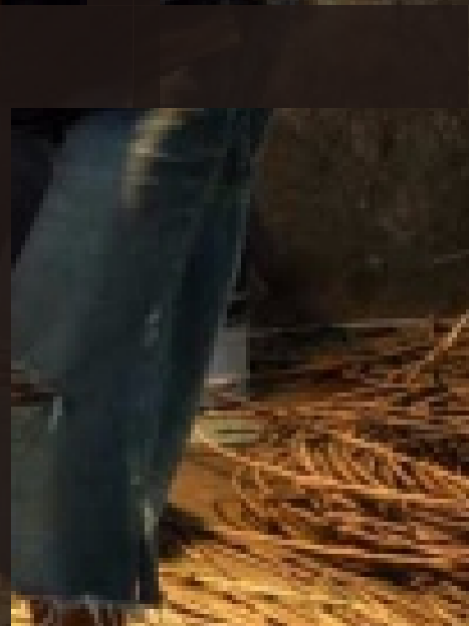
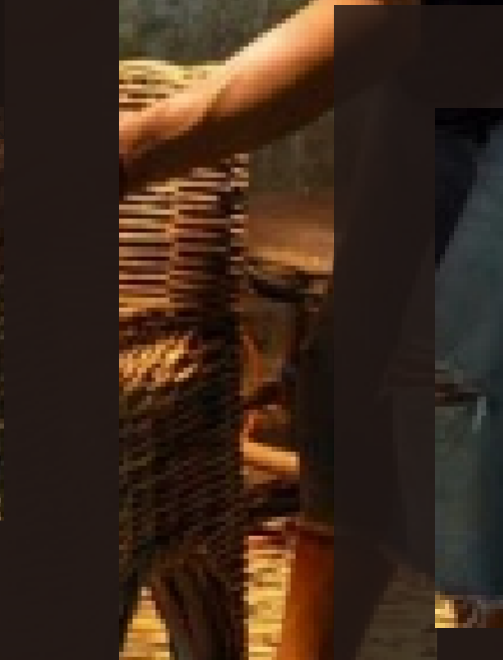


ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN UKM DAN RANTAI PASOK  
DEPUTI BIDANG USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
Jalan H. R. Rasuna Said No.Kav. 3-4, RT.6/RW.7, Kuningan, Karet Kuningan,  
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta

# LAPORAN AKHIR

STUDI PEMILIHAN LOKASI DAN KELAYAKAN  
RUMAH PRODUKSI BERSAMA (FACTORY SHARING)  
DI PROVINSI JAWA TENGAH

AREA ANYAM



TAHUN ANGGARAN 2021